

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2019



Kontribusi pangan	Ketersediaan	
	Energi (Kkal/Kap/Hr)	Protein (Gr/Kap/Hr)
Nabati	5.905	129
Hewani	1.136	110
Total	7.041	239



**DINAS PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pangan Tahun 2019 ini disusun dimaksudkan untuk memberi gambaran penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan OPD ini disusun juga sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi program dan kegiatan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Laporan ini dapat diselesaikan dengan baik atas bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih. Penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang. Semoga laporan ini memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Tanjung Pati, Januari 2020
Kepala Dinas Pangan
Kabupaten Lima Puluh Kota

GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si
NIP. 19650827 198803 1 004

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja pertengahan dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pangan Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja tahunan 2019 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pangan Tahun 2019 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Pangan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pangan Tahun 2016-2021. Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah maka misi Dinas Pangan adalah a) Memantapkan ketersediaan pangan dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan, b) Memantapkan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan pangan secara merata dan terjangkau akses pangan masyarakat c) Meningkatkan percepatan diversifikasi konsumsi pangan d) Mencegah dan penanggulangan kerawanan pangan e) Mendorong dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kemandirian dan ketahanan pangan f) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang Ketahanan pangan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai untuk lima tahun yang mendatang adalah Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran *pertama* adalah terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat; *kedua* adalah meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang Bergizi Seimbang dan Aman; *ketiga* Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama dapat dijabarkan dari tiga sasaran tersebut sebagai berikut : 1) Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein 2) Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 3) Persentase Kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG, 4) Jumlah Nagari yang memiliki sarana Lumbung Pangan 5) Jumlah Nagari Mandiri Pangan 6) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi; 7) Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan; 8) nilai evaluasi AKIP.

Program dan kegiatan Dinas Pangan Tahun 2019 merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, misi seperti yang tertuang dalam renstra Dinas Pangan tahun 2016-2021, serta dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan. Isu-isu aktual tersebut antara lain meliputi aspek ketersediaan pangan, aspek distribusi pangan dan aspek konsumsi pangan. Berdasarkan uraian pada Capaian Kinerja Dinas Pangan Sumatera Barat, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran rata-rata 139,53%. Capaian Kinerja yang tertinggi terdapat pada sasaran Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan

Pangan Masyarakat yaitu sebesar 174,35%, diikuti berturut-turut dengan

2. Capaian Kinerja sasaran tersebut didukung oleh anggaran baik dari anggaran APBN maupun APBD. Akuntabilitas keuangan perprogram untuk pencapaian sasaran tersebut seperti terlihat pada tabel berikut :

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Awal (RP)	Anggaran Perubahan (RP)	Realisasi Anggaran Perubahan (RP)	Perse ntase (%)
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/pertanian)	1.165.293.500	1.761.001.536	1.678.150.378	95,29
2.	Peningkatan Kesejahteraan Petani	90.000.000	90.000.000	88.729.000	98,58
	Jumlah	1.255.293.500	1.851.001.536	1.766.879.378	95,45

3. Berdasarkan uraian diatas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Aspek ketersediaan

- Meningkatkan ketersediaan pangan yang berasal dari produksi lokal untuk mencukupi kebutuhan masyarakat
- Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis (beras, jagung, gula dan daging sapi)
- Mengkoordinasikan dan mengembangkan cadangan pangan dan pemantapan kelembagaan pangan
- Meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan
- Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal

- b. Dalam rangka meningkatkan konsumsi Pangan masyarakat yang B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman), rekomendasi strategi yang dapat dilakukan antara lain :
- Optimalisasi pemanfaatan pekarangan
 - Gencar melakukan sosialisasi/kampanye, promosi dan edukasi budaya konsumsi pangan yang memenuhi kandungan gizi yang B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman), baik secara langsung ke masyarakat maupun melalui media informasi.
 - Mendorong peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis Pangan Lokal dan lomba Cipta Menu
 - Selalu mempromosikan olahan pangan lokal potensi Lima Puluh Kota baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi atau Nasional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Wewenang.....	3
C. Tugas dan Fungsi	4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) SKPD	15
B. Isu-Isu Strategis	23
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	29
B. Hasil Pengukuran Kinerja	32
C. Analisis dan Capaian Kinerja	33
1. Sasaran strategis 1	33
a. Indikator Kinerja 1 : Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari 1	34
b. Indikator Kinerja 2 : Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.....	42
c. Indikator Kinerja 3 : Persentase Kecamatan Rawan Pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG.....	45
d. Indikator Kinerja 4 : Jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan	58
e. Indikator Kinerja 5 : Jumlah Nagari Mandiri Pangan	63

2. Sasaran strategis 2	64
a) Indikator Kinerja 1 : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi Pangan berdasarkan angka kecukupan gizi	68
b) Indikator Kinerja 2 : Persentase pangan segar yang dinyatakan aman hasil uji laboratorium dan lapangan	73
3. Sasaran strategis 3	78
A. Indikator Kinerja 1 : Skor Nilai Evaluasi AKIP	78
B. Hasil Rekomendasi APIP atas Review LKJIP tahun 2018	80
D. Realisasi Anggaran	82
E. Analisis Efisiensi	83

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	84
---------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sumber daya Aparatur berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang.....	12
Tabel 2	Sumber daya Aparatur berdasarkan Pendidikan	13
Tabel 3	Target Indikator Kinerja Dinas Pangan Tahun 2015-2019.....	18
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	28
Tabel 5	Klasifikasi Penilaian dan kategori Penilaian Keberhasilan/kegagalan Pencapaian sasaran Strategis dan capaian Indikator Kinerja.....	29
Tabel 6	Penjelasan hasil penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pangan	31
Tabel 7	Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja	33
Tabel 8	Sasaran Strategis 1	34
Tabel 9	Ketersediaan energi untuk dikonsumsi penduduk kabupaten Lima Puluh	36
Tabel 10	Ketersediaan Protein untuk dikonsumsi penduduk kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Neraca bahan Makanan Tahun 2018-2019	38
Tabel 11	Ketersediaan energi Protein dan berdasarkan Neraca bahan Makanan lemak kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018.....	39
Tabel 12	Ketersediaan energi Protein dan lemak berdasarkan Neraca bahan Makanan kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.....	40
Tabel 13	Komposisi Ketersediaan Energi Kkal/kap/hari.....	40
Tabel 14	Komposisi Ketersediaan Protein gr/kap/hari.....	41
Tabel 15	Lokasi dan sasaran penerima manfaat dalam penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP).....	55
Tabel 16	Nagari Mandiri Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019	62
Tabel 17	Sasaran Strategis 2.....	64
Tabel 18	Skor PPH penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019	69
Tabel 19	Hasil pengujian laboratorium	73
Tabel 20	Hasil Pemeriksaan Uji Lapangan.....	75
Tabel 21	Sasaran Strategis 3	78
Tabel 22	Pengategorian peringkat diartikan interpretasi dan karakteristik instansi	79
Tabel 22	Rincian Nilai Laporan Tahun 2018.....	79
Tabel 23	Realisasi anggaran	82
Tabel 24	Analisis Efisiensi	83
Tabel 25	Daftar Prestasi yang diperoleh tahun 2019.....	86

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Jumlah Energi dan Protein Tahun 2018-2019.....	34
Grafik 2	Target dan Realisasi Ketersediaan Pangan tahun 2019.....	34
Grafik 3	Persentase Komposisi Ketersediaan Energi	41
Grafik 4	Persentase Komposisi Ketersediaan Protein.....	42
Grafik 5	Jumlah Cadangan Pangan Tahun 2019.....	42
Grafik 6	Target dan realisasi Kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG.....	45
Grafik 7	Jumlah Nagari yang memiliki sarana Lumbung	56
Grafik 8	Jumlah Nagari Mandiri Pangan	60
Grafik 9	Skor Pola Pangan Harapan	65
Grafik 10	Persentase pangan segar yang dinyatakan aman	70
Grafik 11	Nilai Evaluasi AKIP	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Sawah Bakir dan Kelengkapannya	59
Gambar 2	LPM Serba Usaha Makmur	59
Gambar 3	LPM Saiyo Sakato	59
Gambar 4	Warung PAMAN kelompok Saiyo Sakato	59
Gambar 5	Pertemuan Evaluasi DMP Harau	59
Gambar 6	Warung PAMAN Kelompok Saiyo Sakato	63
Gambar 7	Pertemuan Evaluasi DMP Harau	63
Gambar 8	Pertemuan Evaluasi DMP Labuah Gunuang	64
Gambar 9	Pertemuan Evaluasi DMP Sei Naniang	64
Gambar 10	Pertemuan Evaluasi DMP Nagari Sariak Laweh	64
Gambar 11	Pertemuan Evaluasi DMP Nagari Pangkalan	64
Gambar 12	Sampel yang diuji dilaboratorium	74
Gambar 13	Tim Keamanan Pangan Segar Kabupaten Lima Puluh Kota	76
Gambar 14	Mengambil sampel di pasar tradisional piladang	77
Gambar 15	Pengujian sampel pasar tradisional Piladang	77
Gambar 16	Mengambil sampel pasar tradisional Suliki	77
Gambar 17	Pengujian sampel pasar tradisional Suliki	77
Gambar 18	Penghargaan Adhykarya Pangan Nusantara Tingkat Provinsi Sumatera Barat	87
Gambar 19	Pemenang Lomba Cipta menu berbasis sumber daya lokal tingkat Sumatera Barat Tahun 2019..	87
Gambar 20	Pemenang Lomba Pemanfaatan Lahan Pekarangan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019	88
Gambar 21	Pemenang Lomba Pemanfaatan Lomba Pekarangan dan Lomba B2SA tingkat Sumatera Barat Tahun 2019.....	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Piagam Penghargaan	89
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja tahun 2019.....	94

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus di implementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada penanggungjawab pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2019, yang diformulasikan dari hasil kinerja di setiap seksi dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pangan. Hal ini dikarenakan setiap seksi dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsi serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stake holder).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 ini tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Pangan dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Perjanjian Kinerja tersebut, memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah SKPD Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Laporan Kinerja ini menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja tingkat pemerintah provinsi disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018 selain untuk memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk mewujudkan keseimbangan antara akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata pemerintahan yang baik.

B. Tugas dan Wewenang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan mempunyai kewenangan sebagai unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut di atas Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Ketahanan Pangan;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Ketahanan Pangan;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Pangan mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasi penyusunan kebijakan teknis di lingkungan urusan Ketahanan Pangan;
- b. Mengkoordinasikan, mengelola, mengendalikan dan memberdayakan penyelenggaraan pelayanan umum dan urusan ketahanan pangan berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Bupati;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan perlindungan teknis di bidang Ketahanan Pangan;
- d. Melaksanakan sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah dan lembaga terkait lainnya;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

C. Tugas dan Fungsi

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan mempunyai kewenangan sebagai unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut di atas Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di bidang ketahanan pangan;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Pangan mempunyai **tugas** :

- a. Mengkordinasikan penyusunan kebijakan teknis dilingkup urusan ketahanan pangan;
- b. Mengkoordinasikan, mengelola, mengendalikan dan memberdayakan penyelenggaraan pelayanan umum dalam urusan ketahanan pangan berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan perlindungan teknis di bidang ketahanan pangan;
- d. Melaksanakan sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga terkait lainnya;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjelaskan tugas dan fungsi maka dapat dijabarkan mengenai uraian tugas dan fungsi dari kepala dinas hingga satu eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah sebagaimana berikut :

1) Kepala Dinas Pangan

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
2. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang pangan;
3. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang pangan;
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
5. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dan bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
8. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Kepala Dinas Pangan mempunyai uraian tugas :

1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
2. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pangan;
3. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang pangan;
4. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan pangan;
5. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
6. Melaksanakan kebijakan teknis bidang pangan;
7. Melaksanakan pengawasan pelayanan bidang pangan;
8. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati terkait dengan bidang pangan;
9. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
10. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
11. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya
12. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
13. Melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja instansi dinas.
14. Melaksanakan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas.
15. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang
16. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku

17. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

2) Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
2. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
3. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
4. pengelolaan penyusunan dan pelaporan program; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai uraian tugas :

1. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
2. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

4. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
6. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
7. mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;
8. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
9. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
10. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
11. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
12. menyusun dan membantu penelaahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
13. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
14. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
15. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
16. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
17. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan ;
18. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
19. melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;

20. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
21. mengelola perencanaan dan program Dinas;
22. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
23. mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas; dan
24. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3) Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
5. Penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai uraian tugas :

1. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
2. Menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
3. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
4. Memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
5. Menyiapkan pemantapan program dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan di bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;

3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
5. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Pangan Pangan sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
2. Menyusun bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
3. Melaksanakan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
4. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- e. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
- f. Seksi Ketersediaan Pangan
- g. Seksi Distribusi Pangan
- h. Seksi Kerawanan Pangan
- i. Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan
- j. Seksi Penganekaragaman Pangan
- k. Seksi Konsumsi Pangan
- l. Seksi Keamanan Pangan
- m. Kelompok Jabatan Fungsional

b. Sumber Daya Aparatur

Komposisi pegawai Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Sumber daya Aparatur berdasarkan Pangkat/Gol ruang dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

No	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah	Ket
1.	Pembina Utama Muda	Golongan IV.c	1	
2.	Pembina Tk I	Golongan IV.b	2	
3.	Pembina	Golongan IV.a	3	
4.	Penata Tk I	Golongan III.d	5	
5.	Penata	Golongan III.c	1	
6.	Penata Muda Tk I	Golongan III.b	2	
7.	Penata Muda	Golongan III.a	1	
8.	Pengatur Tk I	Golongan II.d	1	
9.	Pengatur	Golongan II.c	1	

Tabel 1. Sumber daya Aparatur berdasarkan Pangkat/ Gol ruang

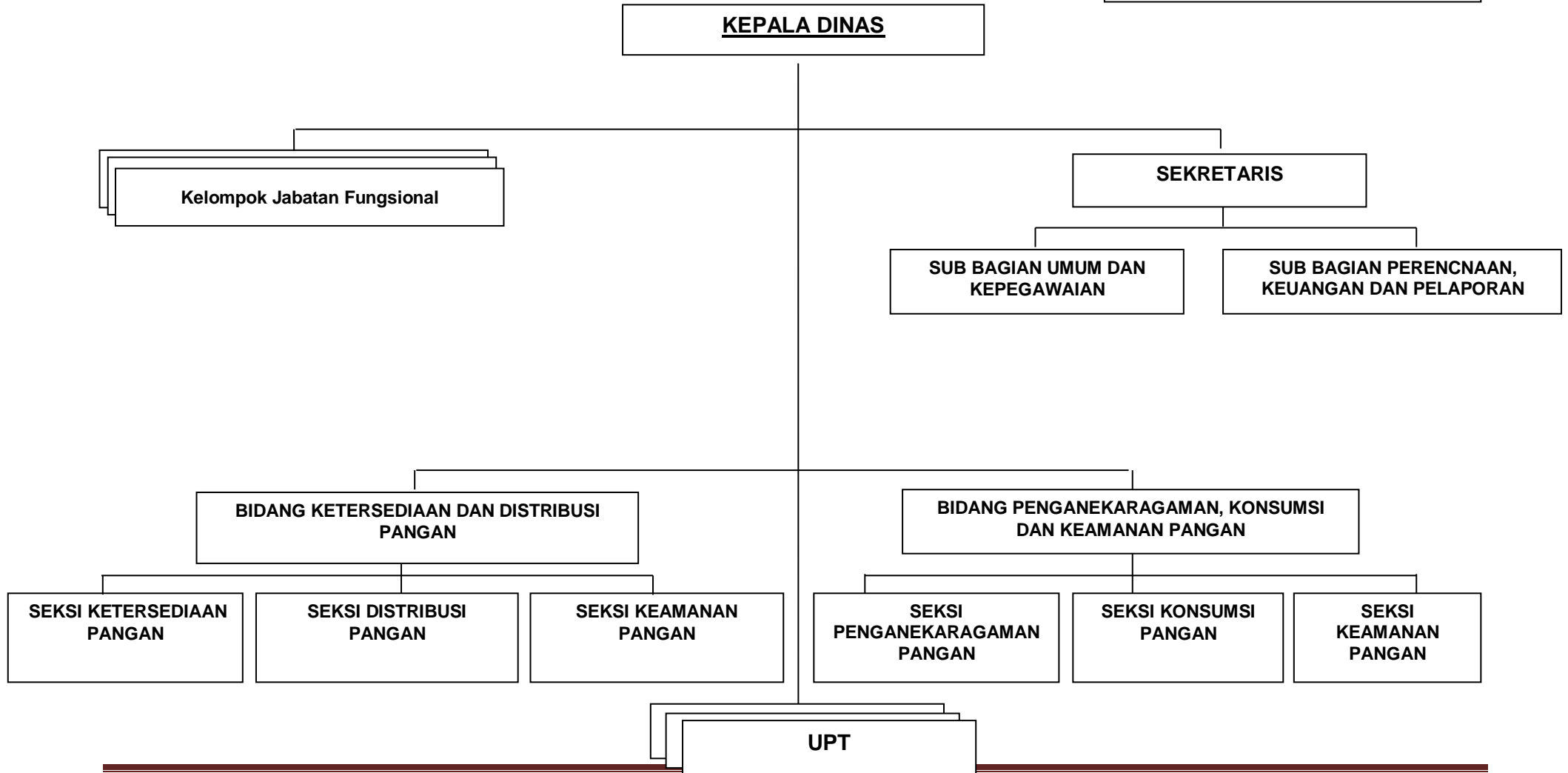
Sumber daya Aparatur berdasarkan Pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Ket
1.	SLTA	2	
2.	Sarjana Muda/D.III	1	
3.	Sarjana Strata 1/D.IV	10	
4.	Sarjana Strata 2/Magister	4	

Tabel 2. Sumber daya Aparatur berdasarkan Pangkat/ Gol ruang

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Dasar : Peraturan bupati Nomor 67 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta tata kerja dinas pangan



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan

Suatu konsep perencanaan strategis organisasi Dinas Pangan yang baik adalah konsep yang dilandasi oleh visi yang jelas dan terarah. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan kemana penyelenggaraan organisasi ketahanan pangan hendak dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- a. Memantapkan ketersediaan pangan dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan
- b. Memantapkan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan pangan secara merata dan terjangkau akses pangan masyarakat
- c. Meningkatkan percepatan diversifikasi konsumsi pangan
- d. Mencegah dan penanggulangan kerawanan pangan
- e. Mendorong dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kemandirian dan ketahanan pangan
- f. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya

1. Tujuan dan sasaran

Dalam rangka mencapai misi dari Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota seperti yang dikemukakan di atas, maka selanjutnya dilakukan perumusan misi tersebut ke dalam bentuk tujuan dan sasaran organisasi.

2.1 Tujuan

Secara umum tujuan pembangunan Ketahanan Pangan yaitu **mewujudkan dan mengembangkan sistem ketahanan pangan yang kuat, dinamis dan sinergis Melalui pengembangan sub sistem ketersediaan pangan, sub sistem konsumsi pangan, sub sistem distribusi pangan, mutu dan keamanan pangan dengan memperhatikan potensi, keragaman sumberdaya pangan dan budaya.** Adapun untuk mencapai tujuan Dinas Pangan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan Ketahanan Pangan
- b. Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup diseluruh rumah tangga.
- c. Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana.
- d. Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.
- e. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan.
- f. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan.
- g. Meningkatkan penganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
- h. Mengembangkan sistem pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
- i. Meningkatkan kinerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam koordinasi dan sinkronisasi pemantapan ketahanan pangan.

2.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pangan dalam Peningkatan Ketahanan Pangan adalah :

1. Terwujudnya Kemandirian dan Keandalan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman
3. Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka mengukur kinerja Dinas Pangan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka ditetapkan indikator kinerja tujuan dan sasaran serta target kinerja jangka menengah yang harus dicapai pada akhir tahun kelima (2019). Indikator kinerja tersebut merupakan indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu :

1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein kap/hari
 - a. Energi (kkal/kap/hari)
 - b. Protein (gr/kap/hari)
2. Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah
3. Persentase kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)
4. Jumlah Nagari yang Memiliki Sarana Lumbung Pangan
5. Jumlah Nagari Mandiri Pangan
6. skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi
7. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan
8. Nilai Evaluasi AKIP

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015-2019, telah ditetapkan pula target indikator kinerja Dinas Pangan tahun 2015-2019. Target indikator kinerja Dinas Pangan tahun 2015-2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein kap/hari					
a. Energi (kkal/kap/hari)	2400kkal/kap/hari	2400kkal/kap/hari	2400kkal/kap/hari	2400kkal/kap/hari	2400kkal/kap/hari
b. Protein (gr/kap/hari)	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr
2. Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah	12 ton	12 ton	45 ton	47 ton	50 ton
3. Persentase kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)	38%	30%	23%	15%	7%
	38%	30%	23%	15%	7%
	76%	69%	61%	53%	46%
4. Jumlah Nagari yang Memiliki Sarana Lumbung Pangan	6 nagari	8 nagari	11 nagari	14 nagari	16 nagari
5. Jumlah Nagari Mandiri Pangan	1 nagari	2 nagari	3 nagari	4 nagari	5 nagari
6. skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	67,5	69,5	71,5	73,5	75,5
7. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	75%	80%	85%	90%	95%
8. Nilai Evaluasi AKIP	55	60	65	70	75

Tabel 3. Target indikator kinerja Dinas Pangan tahun 2015-2019

Target kinerja kegiatan adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Badan Ketahanan Pangan dalam periode 2015-2019 yang berupa output. Berdasarkan indikator kinerja dan arah kebijakan ketahanan pangan, serta mempertimbangkan penanganan ketahanan pangan, maka dirumuskan "**Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)**".

Program tersebut diwujudkan melalui empat aspek kajian yang merupakan sub sistem yang paling berintegrasi dalam pemantapan ketahanan pangan masyarakat. Keempat sub sistem tersebut yaitu : sub sistem ketersediaan pangan, sub sistem distribusi pangan, sub sistem konsumsi pangan dan sub sistem kerawanan pangan.

Untuk menyelenggarakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan 5 (lima) kegiatan yaitu:

1. Pengembangan Ketersediaan Pangan;
2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Harga Pangan;
3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
4. Penanganan Rawan Pangan
5. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

Rencana aksi dalam rangka mencapai sasaran dibagi ke dalam beberapa sub kegiatan yang akan menghasilkan output sebagai sarana untuk mencapai sasaran program (*outcome*). Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pangan tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Ketersediaan Pangan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan upaya memantapkan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Sasaran output dari kegiatan ini adalah (1) Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam serta (2) Meningkatnya ketahanan pangan rumah tangga melalui pengembangan model pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu : (1) Pengembangan Desa Mandiri Pangan.

2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat, serta untuk mengantisipasi kebutuhan pangan masyarakat. Sasaran output dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu: (1) Pengembangan Lumbung pangan Desa; (2) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (3) Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat.

3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan dan memasyarakatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal. Sasaran output dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu: (1) Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (2) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian (3) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (4w) Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani.

4. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Kegiatan ini bertujuan untuk menurunnya jumlah penduduk rawan pangan setiap tahunnya. Sasaran outputnya yaitu menurunkan persentase kecamatan rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan) kegiatan tersebut adalah Penanganan Daerah Rawan Pangan.

5. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan melayani administrasi, keuangan dan aset terhadap penyelenggaraan operasional kantor. Sasaran output dari kegiatan ini adalah (1) Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional

dan berintegritas di lingkungan Dinas Pangan; dan (2) Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

Kegiatan tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) sub kegiatan, yaitu: (1) Penyediaan jasa surat menyurat; (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik ; (3) Penyediaan jasa Administrasi Keuangan (4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (5) Penyediaan Alat Tulis Kantor (6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ; (7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor (8) Penyediaan Makanan dan Minuman (9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah (10) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (11) Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional (12)Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perengkapannya (13) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

2.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran (strategik) merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategik. Strategi akan memberikan arah dan dorongan kegiatan operasi pada para pelaksana kegiatan instansi. Pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik. Cara pencapaian tujuan dan sasaran kinerja tahun 2019 diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

2.3.1 Strategi Pembangunan Ketahanan Pangan

Strategi yang akan ditempuh dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan masyarakat di Daerah Rawan Pangan melalui Pengembangan Nagari Mandiri Pangan (Nagari MANTAP)
- b. Pemantapan dan pengembangan kapasitas kelembagaan Ketahanan Pangan dan sumberdaya aparatur dalam koordinasi program pembangunan ketahanan pangan.

- c. Mendorong terlaksananya koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pembangunan Ketahanan Pangan masyarakat berdasarkan kebijakan daerah
- d. Mendorong Diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan daerah
- e. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pengelola pembangunan ketahanan pangan

2.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta dengan memaksimalkan segala kekuatan dan menyembunyikan kelemahan untuk mengisi/memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun kebijakan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program / kegiatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Menjamin kelangsungan Produksi dalam negeri menuju kemandirian dan keudalatan pangan.
2. Pengembangan sistem distribusi dan informasi harga pangan.
3. Pengembangan sarana lumbung pangan di Nagari Mandiri Pangan (Nagari MANTAP) dan kawasan sentra produksi pangan.
4. Peningkatan Kualitas sumberdaya manusia dalam pembangunan Ketahanan Pangan
5. Pengendalian stabilitas pasokan dan harga pangan
6. Mengembangkan kemampuan pengelola cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif.
7. Adanya kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan sumberdaya manusia pengelola ketahanan pangan.
8. Pengembangan sistem pemantauan produksi, ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.
9. Meningkatkan kerjasama stakeholder pembangunan Ketahanan Pangan di daerah

10. Meningkatkan rumah tangga yang memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.
11. Meningkatkan asupan gizi balita di daerah rawan pangan yang menjadi sumber utama kerawanan pangan.
12. Memberikan pembinaan pada pemasok, pengumpul maupun penjual pangan segar untuk menjaga mutu dan keamanan pangan
13. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.
14. Mengevaluasi pangan segar yang dinyatakan tidak aman setelah uji laboratorium.
15. Meningkatkan integrasi manajemen kinerja yang dibangun dengan pendekatan balance score card dan sistem AKIP dan penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan.

B. Isu-Isu Strategis

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota , merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Regulasi Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan UU Noor 18 Tahun 2012 berkonsekuensi pada regulasi turunan untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan sesuai yang diamanatkan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

Dengan demikian, upaya pemantapan Ketahanan Pangan yang berlandaskan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan dapat diwujudkan. Perwujudan ketahanan pangan tersebut ditandai dengan tiga hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu: (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Ketiadaan regulasi turunan dapat menghambat gerak langkah penyelenggaraan urusan pangan di tingkat Kabupaten.

2. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan Isu produksi dan ketersediaan pangan perlu mendapatkan perhatian. Walaupun produksi pangan Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum mengalami pertumbuhan positif namun belum semua pangan tersedia secara cukup dari hasil produksi Kabupaten Lima Puluh Kota. Kekurangan ketersediaan masih terjadi sehingga sampai saat ini kebutuhan pangan masih harus ditutup dari impor. Isu produksi pangan semakin menarik perhatian mengingat lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksinya, luasnya semakin terbatas. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada. Penguatan Cadangan Pangan Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

3. Peningkatan Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan Isu informasi harga, pasokan dan akses pangan diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan Isu ini stabilitas pasokan, harga pangan dan distribusi penting karena : (1) masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen, (b) harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentang terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan prasarana distribusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang
4. Penanganan Kerawanan Pangan Potensi kerawanan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan,

potensi sumber daya yang rendah, stunting dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/Kota. Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan melakukan kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi dengan cara memberikan bantuan pada anak yang menyebabkan angka kerawanan pangan meningkat.

5. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.
6. Peningkatan Keamanan Pangan Segar Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019, maka dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dilimpahkan pada Dinas Pangan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

Perjanjian kinerja tahun 2019 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang merupakan bentuk komitmen antara Kepala Dinas Pangan selaku kepala organisasi yang bertanggung jawab atas program-program kerja yang sudah ditetapkan dengan Bupati selaku Kepala Daerah. Penetapan Kinerja Dinas Pangan Tahun 2019 berisi tentang sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang menjadi target pada tahun anggaran 2019.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

SKPD : Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun : 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Kemandirian dan Keandalatan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari a. Energi (Kkal/kap/hari) b. Protein (gr/kap/hari)	a. 2400 kkal/kap/hari b. 63 gr/kap/hari
		2. Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	45 Ton
		3. Persentase Kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)	23% 23% 61%

		4. Jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan	11 Nagari
		5. Jumlah Nagari Mandiri Pangan	3 Nagari
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	6. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	71,5
		7. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	85%
3	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	8. Nilai Evaluasi AKIP	65

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 453.187.500,-	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp. 124.350.000,-	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 16.000.000,-	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 30.000.000,-	APBD
5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Rp. 1.769.087.500,-	APBD
6	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp. 90.000.000,-	APBD
	Jumlah	Rp. 2.482.625.000,-	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Berisikan Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut :

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Tabel 5. Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator kinerja

Penjelasan secara rinci mengenai metode perhitungan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pangan dari masing-masing indikator, dapat dilihat pada Tabel Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Pangan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4
1	1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari a. Energi (Kkal/kap/hari) b. Protein (gr/kap/hari)	a. 2400 kkal/kap/hari b. 63 gr/kap/hari	Semakin tinggi tingkat ketersediaan energi dan protein semakin beragam ketersediaan pangan bagi masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik dan dapat memacu terwujudnya kemandirian dan keudalatan pangan yang selaras dengan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
	2. Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	45 ton	Semakin besar jumlah penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah semakin maka terwujudnya ketahanan pangan sehingga capaian kinerja semakin baik
	3. Persentase Kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)	23% 23% 61%	Semakin kecil persentase kecamatan rawan pangan semakin sedikit Kecamatan yang rawan pangan. Dengan sedikitnya kecamatan rawan pangan maka terwujudnya kemandirian dan keudalatan pangan yang selaras dengan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik
	4. Jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan	11 Nagari	Semakin banyak nagari yang memiliki lumbung pangan maka semakin terwujud ketahanan pangan sehingga capaian kinerja semakin baik.

	5. Jumlah Nagari Mandiri Pangan	3 Nagari	Semakin banyak Nagari Mandiri Pangan maka akan terwujudnya kemandirian dan keudalatan pangan yang selaras dengan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik
2	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	71,5	Semakin besar capaian keberhasilan skor PPH konsumsi, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik.
	2. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	85%	Semakin tinggi persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman, maka semakin aman pangan segar di masyarakat, sehingga capain kinerja semakin baik
3	3. Nilai Evaluasi AKIP	65	Semakin tinggi nilai evaluasi AKIP sehingga akan mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja sehingga capain kinerja semakin baik

Tabel 6. Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Pangan

A. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Berisikan Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja yang disusun seperti tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari				
		a. Energi (Kkal/kap/hari)	a. 2400 kkal/kap/hari	a. 7406 kkal/kap/hari	a. 308%	Sangat tinggi
		b. Protein (gr/kap/hari)	b. 63 gr/kap/hari	b. 252 gr/kap/hari	b. 400%	Sangat Tinggi
		2. Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	45 Ton	4,12 Ton	9,1%	Sangat Rendah
		3. Persentase Kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)	30% 30% 69%	0 0 53,84%	0 0 78,02%	Tinggi
4. Jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan	11 Nagari	13 Nagari	118%	Sangat Tinggi		
5. Jumlah Nagari Mandiri Pangan	3 Nagari	4 Nagari	133 %	Sangat Tinggi		
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	6. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	71,5	75,4	105%	Sangat Tinggi

		7. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	85%	100% 88%	117% 103%	Sangat tinggi
3	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	8. Nilai Evaluasi AKIP	65	61,91	95,24	Sangat Tinggi

Tabel 7. Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja

C.ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Berisikan uraian capaian Kinerja dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKPD

1. Sasaran Strategis I

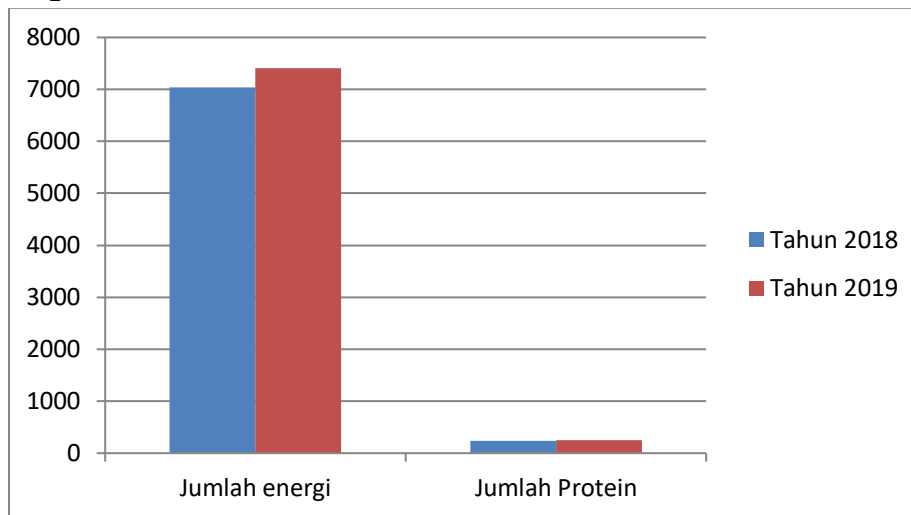
Sasaran Strategis I

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Ket
1.	1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari a. Energi (Kkal/kap/hari) b. Protein (gr/kap/hari)		a. 2400 kkal/kap/hari b. 63 gr/kap/hr	a.7041 kkal/kap/hari b.239gr/kap/hr	a. 2400 kkal/kap/hari b. 63 gr/kap/hr	c. 7406 kkal/kap/hari d. 252 gr/kap/hr	
	2. Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah		12 ton	6,5 Ton	45 ton	4,120 Ton	
	3. Persentase Kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)		30% 30% 69%	0 % 0 % 53,84%	23% 23% 61%	0 % 0 % 53,84%	

4. Jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan	8 Nagari	12 Nagari	11 Nagari	13 Nagari
5. Jumlah Nagari Mandiri Pangan	2 Nagari	3 Nagari	3 Nagari	4 Nagari

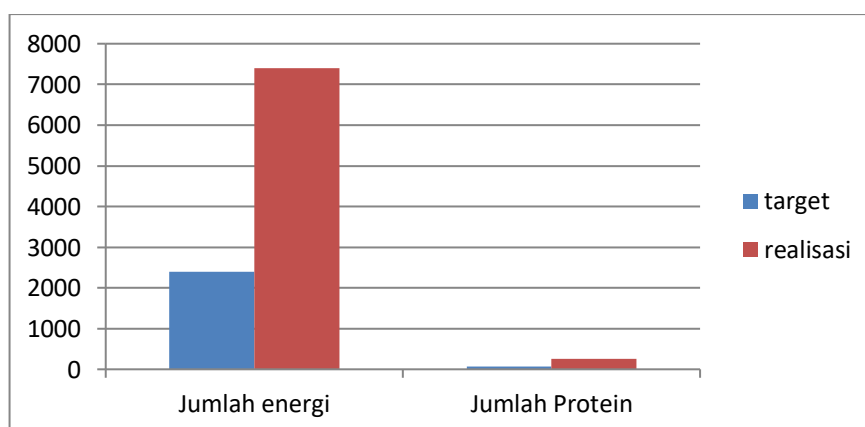
Tabel 8. Sasaran Strategis 1

a. Indikator Kinerja 1 : Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari



Grafik 1. Jumlah Energi dan Protein tahun 2018 dan 2019

Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa jumlah ketersediaan energi meningkat dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018 sebesar 7041 kkal/kap/hari dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 7406 kkal/kap/hari. Jumlah ketersediaan protein juga meningkat, pada tahun 2018 dengan jumlah 239 gr/kap/hari meningkat menjadi 252 gr/kap/hari.



Grafik 2. Target dan realisasi ketersediaan pangan tahun 2019

Dari grafik diatas dapat dilihat ketersediaan energi dan protein tahun 2019 diatas target yang telah ditetapkan, yaitu jumlah energi dengan target

2400 kkal/kap/hari sedangkan realisasinya 7406 kkal/kap/hari, begitupun dengan protein dengan target 63 gr/kap/hari sedangkan capaiannya sebesar 252 gr/kap/hari.

Ketersediaan Pangan adalah ketersediaan pangan secara fisik di suatu wilayah dari segala sumber, baik itu produksi pangan domestik, perdagangan pangan dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu: (1) produksi dalam negeri; (2) pemasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan.

Jumlah penduduk yang besar dan kemampuan ekonomi relatif lemah, maka kemauan untuk tetap menjadi bangsa yang mandiri dibidang pangan harus terus diupayakan dari produk dalam negeri. Hal yang perlu disadari adalah kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi sendiri, khususnya bahan pangan pokok juga menyangkut harkat martabat dan kelanjutan eksistensi bangsa. Sedangkan impor pangan merupakan pilihan akhir, apabila terjadi kelangkaan produksi dalam negeri.

Situasi ketersediaan pangan untuk dikonsumsi masyarakat secara agregat dapat diketahui dengan menggunakan Tabel Neraca Bahan Makanan (NBM). Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan tabel yang memuat informasi tentang situasi pengadaan/penyediaan pangan (*food supply*), dan penggunaan pangan (*food utilization*), hingga ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk suatu wilayah dalam suatu kurun waktu tertentu. Melalui NBM dapat diketahui kondisi ketersediaan pangan dalam periode tertentu (defisit atau surplus), baik ketersediaan dalam jumlah (volume) yang dinyatakan dalam satuan kilogram perkapita pertahun atau gram per kapita perhari maupun ketersediaan gizi perkapita perhari yang dinyatakan dalam satuan Kkal/kapita/hari (untuk ketersediaan energy) atau gram/kapita/hari (untuk ketersediaan protein).

Dalam penyusunan NBM, data yang digunakan bersumber dari berbagai instansi terkait dan pihak-pihak yang sangat relevan dalam penyusunan NBM, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Data yang digunakan dalam penyusunan NBM terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait terutama data yang telah dipublikasikan dan mempunyai legalitas dari Badan Pusat Statistik. SKPD yang terlibat antara lain BPS, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Energi adalah sejumlah kalori hasil pembakaran karbohidrat yang berasal dari berbagai jenis bahan makanan/komoditi. Energi ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk kegiatan tubuh seluruhnya. Didalam menghitung ketersediaan energi, satuan yang digunakan adalah kkal/kapita/hari. Untuk lebih jelasnya gambaran ketersediaan energi selama tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Ketersediaan Energi Untuk Dikonsumsi Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Neraca Bahan makanan Tahun 2018 – 2019

No	Kelompok Makanan	Ketersediaan Energi (Kkal/kapita/hari)	
		2018*)	2019**)
A	Pangan Nabati	5.905	6.018
1	Padi-padian	4.908	5.056
2	Makanan Berpati	575	515
3	Gula	142	144
4	Buah/Biji Berminyak	24	30
5	Buah-buahan	144	155
6	Sayuran	112	118
B	Pangan Hewani	1.136	1.388
7	Daging	37	252
8	Telur	555	585
9	Susu	295	346
10	Ikan	227	192
11	Minyak dan Lemak	22	13
	Jumlah	7.041	7.406

Tabel 9. Ketersediaan Energi Untuk Dikonsumsi Penduduk

Dari data yang disajikan diatas terlihat bahwa jumlah ketersediaan energi pangan nabati tahun 2018 dan tahun 2019 lebih besar daripada jumlah ketersediaan energi yang berasal dari hewani. Ketersediaan energi pangan yang berasal dari kelompok nabati pada tahun 2018 berjumlah 5.905 kkal/kapita/hari sedangkan berasal dari hewani 1.136 kkal/kapita/hari. Kemudian pada tahun 2019 ketersediaan energi pangan yang berasal dari nabati berjumlah 6.018 kkal/kapita/hari sedangkan berasal dari hewani 1.388kkal/kapita/hari.

Ketersediaan energi terbesar dari tahun 2018–2019 disumbangkan oleh kelompok pangan padi-padian, masing-masingnya pada tahun 2018 sebesar 4.908 kkal/kapita/hari dan tahun 2019 sebesar 5.056 kkal/kapita/hari. Sementara ketersediaan energi terkecil dari tahun 2018 berasal dari kelompok minyak dan lemak yaitu tahun 2018 sebesar 22 kkal/kapita/hari dan tahun 2019 berasal dari kelompok minyak dan lemak kembali sebesar 13 kkal/kapita/hari. Secara keseluruhan, ketersediaan energi tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 7.041 kkal/kapita/hari menjadi sebesar 7.406 kkal/kapita/hari.

2. Ketersediaan Protein

Protein adalah suatu persenyawaan yang mengandung unsur 'N' yang sangat dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan serta penggantian jaringan-jaringan yang rusak/aus. Didalam menghitung ketersediaan protein, satuan yang digunakan adalah gr/kapita/hari. Untuk lebih jelasnya gambaran ketersediaan protein selama tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Ketersediaan Protein Untuk Dikonsumsi Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Neraca Bahan makanan Tahun 2018 – 2019

No	Kelompok Makanan	Ketersediaan Protein (Gr/kapita/hari)	
		2018*)	2019**)
A	Pangan Nabati	129	132
1	Padi-padian	117	120
2	Makanan Berpati	4	3
3	Gula	0	0
4	Buah/Biji Berminyak	1	2
5	Buah-buahan	2	2
6	Sayuran	5	5
B	Pangan Hewani	110	120
7	Daging	4	16
8	Telur	45	47
9	Susu	15	18
10	Ikan	46	39
11	Minyak dan Lemak	0	0
	Jumlah	239	252

Tabel 10. Ketersediaan Protein Untuk Dikonsumsi Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Neraca Bahan makanan Tahun 2018 – 2019

Dari data yang disajikan pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah ketersediaan protein pangan nabati tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami peningkatan daripada jumlah ketersediaan protein yang berasal dari hewani. Ketersediaan protein pangan yang berasal dari nabati pada tahun 2018 berjumlah 129 gram/kapita/hari sedangkan berasal dari hewani 110 gr/kapita/hari. Kemudian pada tahun 2019 ketersediaan protein pangan yang berasal dari nabati berjumlah 132 gr/kapita/hari sedangkan jumlah ketersediaan protein berasal dari hewani sama dengan tahun 2018 yaitu 120 gr/kapita/hari.

Ketersediaan protein terbesar dari tahun 2018 – 2019 disumbangkan oleh kelompok pangan padi-padian, masing-masingnya pada tahun 2018 sebesar 117 gr/kapita/hari dan tahun 2019 sebesar 120 gr/kapita/hari. Sementara ketersediaan protein dari pangan gula dan pangan minyak dan lemak bernilai nol tahun 2018-2019. Secara keseluruhan ketersediaan protein pada kelompok pangan maupun kelompok nabati mengalami

peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu dari (239gr/kapita/hari) meningkat menjadi (252gr/kapita/hari).

Kebutuhan esensial dan komoditas paling strategis dalam kehidupan manusia. Penyediaan pangan untuk konsumsi harus memenuhi kebutuhan gizi penduduk. Salah satu masalah ketersediaan pangan adalah untuk mengetahui apakah penyediaan pangan yang ada mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk. Rata-rata angka kecukupan gizi (AKG) di tingkat ketersediaan berdasarkan rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2019 adalah sebesar 2.400 kkal / kap / hari untuk energi dan 63 gram / kap / hari untuk protein.

Untuk itu perlu dipahami situasi pangan disuatu daerah dalam periode tertentu, selanjutnya diupayakan strategi untuk mencapai ketahanan pangan. Untuk lebih jelasnya gambaran ketersediaan energi, dan protein selama tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018(ATAP)

Kontribusi pangan	Ketersediaan	
	Energi (Kkal/Kap/Hr)	Protein (Gr/Kap/Hr)
Nabati	5.905	129
Hewani	1.136	110
Total	7.041	239

Tabel 11. Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018(ATAP)

Pada Tabel 9 menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan energi pada tahun 2018 terdapat kelebihan/surplus di atas angka kecukupan gizi (2.400kkal) yaitu sebesar 7.041Kkal/kap/hr. Sedangkan total angka ketersediaan protein yaitu 239gram/kap/hari. Kontribusi energi dari kelompok pangan nabati cenderung lebih banyak dari pada kelompok pangan dari hewani. Begitu juga ketersediaan protein, kontribusi pangan

nabati lebih tinggi pada daripada kontribusi pangan hewani sementara ketersediaan lemak kontribusi pangan hewani lebih daripada kontribusi pangan nabati.

Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 (Angka Sementara)

Kontribusi pangan	Ketersediaan	
	Energi (Kkal/Kap/Hr)	Protein (Gr/Kap/Hr)
Nabati	6.018	132
Hewani	1.388	120
Total	7.406	252

Tabel 12. Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 (Angka Sementara)

Pada Tabel menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan energi pada tahun 2019 terdapat kelebihan/surplus di atas angka kecukupan gizi (2.400 kkal) yaitu sebesar 7.406 Kkal/kap/hr. Sedangkan angka ketersediaan protein juga tetap di atas angka anjuran yaitu 252 gram/kap/hari. Kontribusi energi dari kelompok pangan nabati lebih tinggi dari pada kelompok pangan hewani. Begitu juga ketersediaan protein, kelompok pangan nabati lebih tinggi daripada kontribusi pangan hewani sementara ketersediaan lemak kontribusi hewani lebih tinggi daripada kontribusi nabati.

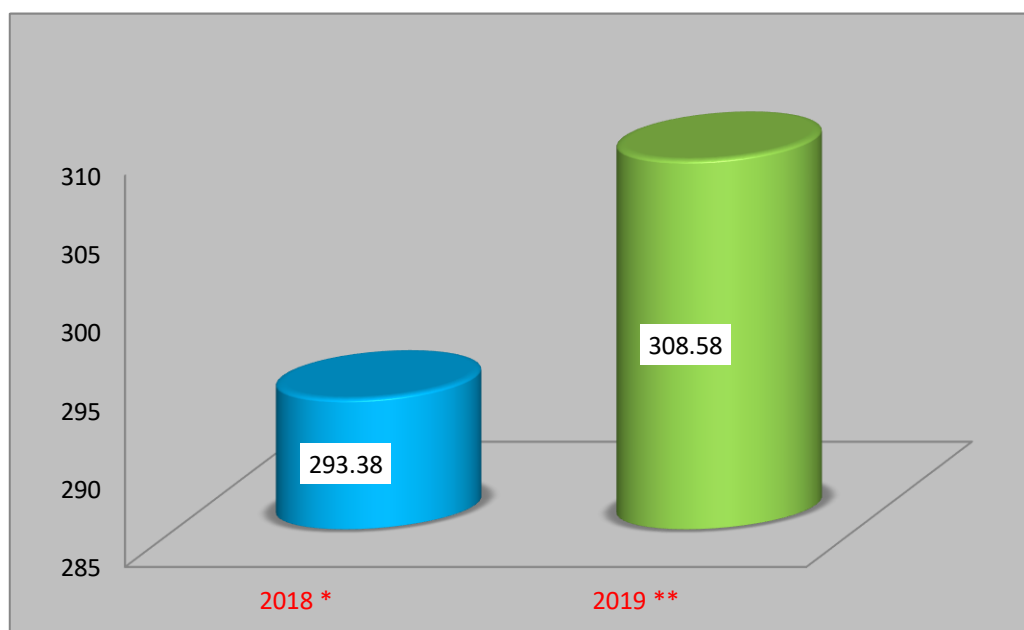
Komposisi ketersediaan energi, protein dan lemak di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018 - 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Komposisi Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr)

No	Tahun	Pencapaian	Dianjurkan	Persentase (%)
1	Tahun 2018 *)	7.041	2.400	293,38
2	Tahun 2019 **)	7.406	2.400	308,58

Tabel 13. Komposisi Ketersediaan Energi (kkal/ kap/ hr)

Grafik Persentase Komposisi Ketersediaan Energi (%)



Grafik 3. Persentase Komposisi Ketersediaan Energi (%)

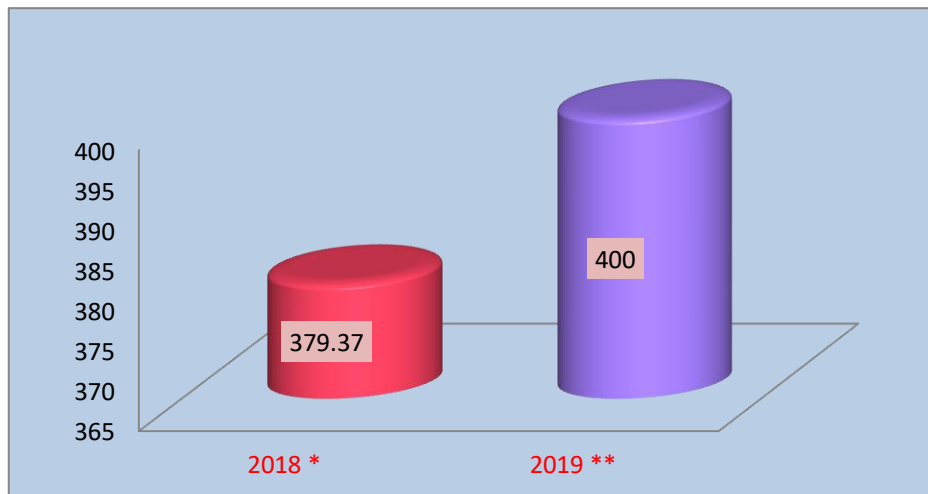
Pada tabel dan grafik persentase ketersediaan energi dapat dilihat bahwa dari tahun pencapaian 2018 menuju tahun 2019 mengalami peningkatan, dan setiap tahunnya mengalami kelebihan pencapaian/surplus dari anjuranketersediaan energi yaitu sebesar 2.400kcal/kap/hari. Ketersedian energi pada tahun 2018 mencapai 7.041kcal/kap/hari yang hampir 293,38% dari anjuran yang ditetapkan AKG, sedangkan pada tahun 2019 ketersediaan energi mencapai 7.406kcal/kap/hr yaitu 308,58 % dari anjuran yang ditetapkan AKG. Dengan kondisi ini diharapkan dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Komposisi Ketersediaan Protein (gr/kap/hr)

No	Tahun	Pencapaian	Dianjurkan	Persentase (%)
1	Tahun 2018 *)	239	63	379,37
2	Tahun 2019 **)	252	63	400

Tabel 14. Komposisi Ketersediaan Protein (gr/kap/hr)

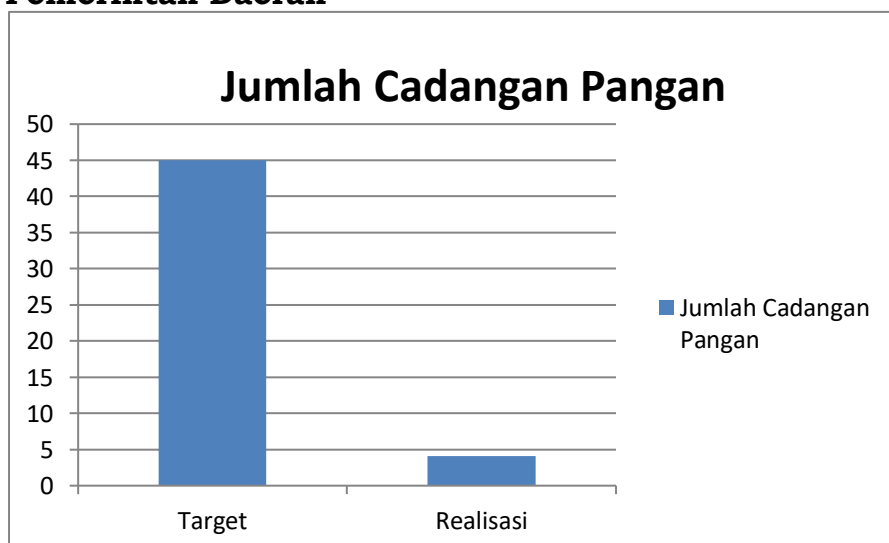
Grafik Persentase Komposisi Ketersediaan Protein (gr/kap/hr)



Grafik 4. Persentase Komposisi Ketersediaan Protein (gr/kap/hr)

Berdasarkan tabel dan grafik persentase ketersediaan protein diatas dapat diketahui bahwa komposisi ketersediaan protein pada tahun 2018–2019 telah melebihi angka kecukupan gizi yang dianjurkan oleh (WNPG) X dimana AKG tingkat ketersediaan untuk protein 63gr/kapita/hari. Pada tahun 2018 hampir mencapai 379,37% melebihi dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan hingga mencapai 400% dari anjuran ketersediaan protein, hal ini juga mengindikasikan bahwa komposisi ketersediaan protein di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup ideal.

b. Indikator Kinerja 2 : Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah



Grafik 5. Jumlah Cadangan Pangan Tahun 2019

Dari grafik diatas dapat dilihat Jumlah cadangan pangan tahun 2019 ini sangat jauh di bawah target yang telah ditetapkan hal ini disebabkan tidak tersedianya anggaran untuk pengadaan cadangan pangan kabupaten Lima Puluh Kota. Capaian ini diperoleh dari jumlah penyediaan Cadangan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk tahun 2019 ini ditargetkan sebanyak 45 ton namun hanya terealisasi sebanyak 4,120 Ton (4.120 kg) beras, dan melalui kerjasama dengan Perum Bulog Divre Bukittinggi penyediaan Cadangan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota terealisasi 100%.

Tujuan Pencapaian sasaran strategis " Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat" dengan Indikator Kinerja Utama jumlah cadangan pangan Kabupaten pertahun adalah 45 Ton. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan **rendah**.

Pada tahun 2019 ini Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mempunyai cadangan pangan sebanyak 12,830 Ton (12.830 kg), sementara berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang penetapan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, dimana Provinsi harus memiliki cadangan pangan minimal 2.952 Ton sedangkan untuk Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 166 Ton. Sehingga cadangan pangan Kabupaten Lima Puluh Kota masih kurang sebanyak 153,17 ton.

Pendistribusian Cadangan Pangan daerah dilakukan untuk korban bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Harau dan Kecamatan Akabiluru . Dimana dasar memilih keluarga yang mendapatkan distribusi beras adalah keluarga yang memiliki sawah yang sudah mendekati panen namun terkena banjir dan tidak dapat produksi lagi. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerawanan pangan pada kecamatan tersebut pasca terjadinya bencana alam. Adapun rinciannya sebagai berikut :

- Kecamatan Harau terdapat 356 KK yang terdiri dari 1213 jiwa, sehingga jumlah bantuan yang diberikan untuk Kecamatan Lareh Sago Halaban sebesar 5.003,625 kg berdasarkan $(275 \text{ gr/kap/hari} \times \text{jumlah jiwa} \times 15 \text{ hari}) = 5.000,625 \text{ kg}$
- Kecamatan Akabiluru terdapat 2 Nagari yaitu Batu Hampar dan Durian gadang
 - a. Nagari Batu Hampar 20 KK yang terdiri dari 98 Jiwa, sehingga jumlah bantuan yang didapat untuk kecamatan Luak sebesar 404,250 kg. Dimana dapat dihitung dengan $275 \text{ gr/kap/hari} \times \text{jumlah jiwa} \times 15 \text{ hari} = 404,250 \text{ kg}$.
 - b. Nagari Durian gadang 19 KK yang terdiri dari 64 Jiwa, sehingga jumlah bantuan yang didapat untuk kecamatan Luak sebesar 264 kg. Dimana dapat dihitung dengan $275 \text{ gr/kap/hari} \times \text{jumlah jiwa} \times 15 \text{ hari} = 264 \text{ kg}$.

Total dari cadangan pangan yang sudah didistribusikan sebanyak 5,668 Ton (5.668 kg).

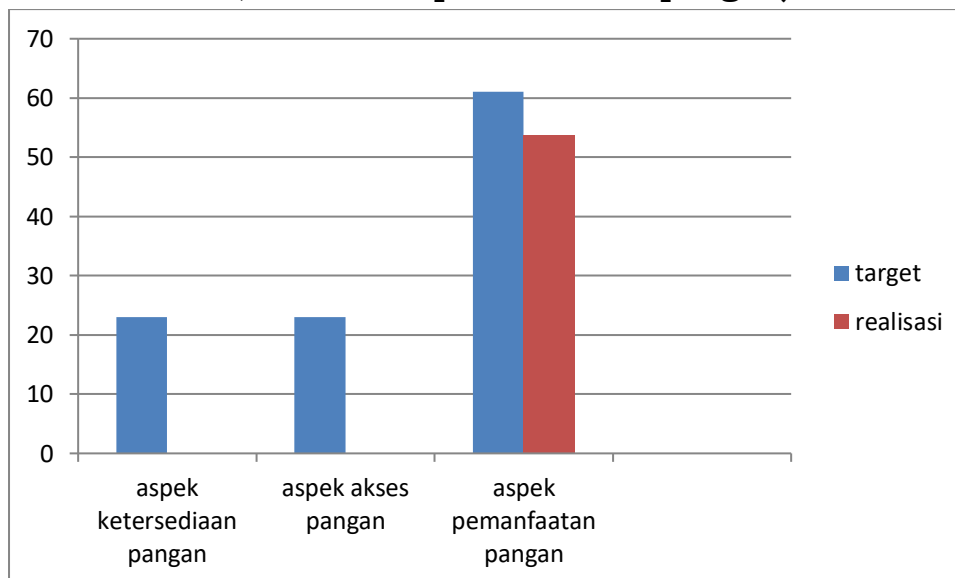
Salah satu indikator terbangunnya ketahanan pangan indikasi kerawanan pangan. Salah satu aspek penting dalam pencapaian tersebut adalah ketersediaan cadangan pangan dan kemampuannya dalam mendayagunakan sumber daya pangan yang ada. Pengembangan cadangan pangan baik di tingkat rumah tangga maupun wilayah dinilai strategis dalam rangka mengatasi resiko situasi yang tidak normal. Pengelolaan stok secara bijak di tingkat rumah tangga, masyarakat, pemerintah daerah, merupakan salah satu kunci tercapainya ketahanan pangan

Cadangan pangan merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya setiap saat. Pasokan yang stabil dari waktu ke waktu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebaiknya dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri, terutama untuk mengatasi kekurangan pangan, kelebihan pangan

dan atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan yang mengakibatkan terjadinya rawan pangan.

Pengadaan cadangan pangan pemerintah diutamakan melalui pembelian pangan pokok tertentu produksi dalam negeri berdasarkan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini Perum Bulog. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu. Penyaluran cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi : (1) kekurangan pangan, (2) gejolak harga pangan, (3) bencana alam, (4) bencana sosial, dan / atau (5) keadaan darurat.

c. Indikator Kinerja 3 : Persentase Kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)



Grafik 6. Target dan realisasi Kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi masing-masing aspek ada dibawah terget yang ditetapkan dimana artinya semakin sedikit daerah rawan pangan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

kerawanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat. Keadaan rawan pangan dapat dilihat dari kondisi daerah/wilayah atau rumah tangga yang terganggu ketersediaan pangannya, dan kondisi lain pada masyarakat atau keluarga yang terganggu kemampuan aksesnya terhadap pangan tersebut.

Penanganan Daerah Rawan Pangan merupakan upaya untuk menangani suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami oleh daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Untuk penanganan daerah rawan pangan dilakukan beberapa tahap kegiatan yaitu :

1. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi merupakan serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi, yang pedomannya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor : 43/Permentan/OT.140/7/2010.

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) diawali dengan pelaksanaan kegiatan pengamatan situasi pangan, dengan teknik penyediaan data/informasi erhadap penanganan masalah gangguan pangan yang berpeluang muncul setiap saat.

Analisis data SKPG terdiri dari analisis data bulanan dan tahunan pada tiga aspek utama yaitu aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Analisis data SKPG bulanan ditunjukkan dengan nilai persentase ketersediaan pangan bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata data tersebut dalam lima tahun terakhir pada luas tanam dan luas puso, serta diperkuat dengan analisis data luas panen dan cadangan pangan pada komoditas pangan utama seperti padi, ubi kayu, ubi jalar, dan jagung.

Analisis data akses pangan bulanan ditunjukkan dengan membandingkan harga pada bulan berjalan dengan rata-rata data harga tiga bulan terakhir pada komoditas pangan utama dan strategis seperti beras, jagung, ubi kayu, ubi jalar, gula, minyak goreng, daging ayam, dan telur. Analisis data pemanfaatan pangan bulanan dapat ditunjukkan oleh status gizi balita dengan menghitung angka balita naik berat badan, angka balita yang tidak naik berat badan dalam dua kali penimbangan berturut-turut, dan angka balita dengan berat badan di bawah garis merah dibandingkan angka balita yang ditimbang pada bulan tersebut.

Untuk menghitung persentase Kecamatan rawan pangan dapat dilihat dari beberapa aspek berikut :

A. Ketersediaan Pangan

Aspek ketersediaan (Food Availability) yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ini diharapkan mampu mencukupi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat.

Untuk melihat aspek ketersediaan pangan kita menggunakan data produksi (luas tanam, luas panen, luas puso), data konsumsi pangan, data jumlah penduduk dan cadangan pangan melalui mekanisme pasar di wilayah tersebut, stok yang dimiliki oleh pedagang dan cadangan pemerintah dan bantuan pangan dari pemerintah atau organisasi lainnya. Dari data yang diolah didapatkan daerah yang rawan selama satu tahun yaitu sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	BULAN											Gab	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOV		
1	PAYAKUMBUH	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	AKABILURU	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	LUAK	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	LAREH SAGO HALABAN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	SITUJUAH LIMO NAGARI	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	HARAU	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	GUGUAK	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	MUNGKA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	SULIKI	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	BUKIK BARISAN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11	GUNUANG OMEH	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12	KAPUR IX	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13	PANGKALAN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Ket :

1. 7-12 BULAN HIJAU

2. 4-6 BULAN HIJAU

≥ 6 BULAN KUNING

3. ≤ 3 BULAN HIJAU

≥ 7-12 BULAN MERAH



Aman = Akabiluru, Lareh Sago Halaban, Harau, Bukik Barisan

Waspada = Payakumbuh, Luak, Situjuah Limo Nagari, Guguak, Mungka, Suliki

Rawan = -

Dari peta diatas dapat kita hitung persentase daerah rawan pangan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kec. Dengan Ketersediaan Pangan yang rawan Pangan}}{\text{Jumlah Kecamatan yang Ada}} \times 100\% = \frac{0}{13} \times 100\% = 0$$

B. Akses Pangan

Aspek Akses Pangan (Food Akses) yaitu kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumberdaya yang dimiliki untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, pembelian ataupun melalui bantuan pangan. Akses rumah tangga dari individu terdiri dari akses ekonomi, fisik dan sosial. Akses ekonomi tergantung pada pendapatan, kesempatan kerja, dan harga.




Akses fisik menyangkut tingkat tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana distribusi), sedangkan akses sosial menyangkut tentang referensi pangan atau dapat dikatakan keterjangkauan dalam pengukuran ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga dilihat dari kemudahan rumah tangga memperoleh pangan yang dapat diukur dari pemilikan lahan. Cara memperoleh pangan juga dapat dengan memperoleh produksi sendiri dan membeli.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Akses Pangan dapat di kategorikan dalam faktor-faktor yang bersifat fisik antara lain kelancaran sistem distribusi, terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi sehingga tidak menimbulkan terjadinya isolasi daerah. Faktor yang bersifat ekonomi antara lain kemampuan atau peningkatan daya beli masyarakat atau individu karena adanya kesempatan kerja menyebabkan pendapatan tinggi sehingga harga pangan terjangkau. Faktor yang bersifat sosial antara lain tidak adanya konflik sosial yang disebabkan oleh buruknya adat atau kebiasaan, tinggi rendahnya pengetahuan sehingga berpengaruh pada preferensi atau pemilihan jenis pangan. Suatu contoh adanya pengetahuan tentang asupan gizi pada komoditas pangan yang seharusnya dikonsumsi maka rumah tangga atau individu dengan pendapatan yang tinggi maka tidak mustahil rumah tangga/individu akan memilih komoditas pangan yang memiliki mutu dan kualitas.

Untuk melihat aspek Akses pangan kita menggunakan data Harga pangan. Dari data yang diolah didapatkan daerah yang rawan selama satu tahun yaitu sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	BULAN											Gab		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOV			
1	PAYAKUMBUH	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
2	AKABILURU	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
3	LUAK	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
4	LAREH SAGO HALABAN	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
5	SITUJUAH LIMO NAGARI	Green	Red	Yellow	Green	Green	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
6	HARAU	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
7	GUGUAK	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
8	MUNGKA	Yellow	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
9	SULIKI	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
10	BUKIK BARISAN	Yellow	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Yellow
11	GUNUANG OMEH	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
12	KAPUR IX	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
13	PANGKALAN	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green

Ket :

1. 7-12 BULAN HIJAU  Aman = Payakumbuh, Akabiluru, Luak, Lareh Sago Halaban, Situjuah Limo Nagari, Harau, Guguak, Mungka, Suliki, Gunuang Omeh, Kapur IX, Pangkalan
2. 4-6 BULAN HIJAU  Waspada = Bukik Barisan
3. ≤ 3 BULAN HIJAU  Rawan = -

Dari peta diatas dapat kita hitung persentase daerah rawan pangan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kec. Dengan Akses Pangan yang rawan Pangan}}{\text{Jumlah Kecamatan yang Ada}} \times 100\% = \frac{0}{13} \times 100\% = 0$$

C. Pemanfaatan Pangan

Aspek Pemanfaatan Pangan (Food Utilization) yaitu penggunaan pangan untuk kebutuhan hidup sehat yang meliputi kebutuhan energi dan gizi, air dan kesehatan lingkungan. Efektifitas dari pemanfaatan pangan tergantung pada pengetahuan rumah tangga/individu sanitasi dan ketersediaan air, fasilitas kesehatan, serta penyuluhan gizi dan pemeliharaan balita.

Pemanfaatan pangan/konsumsi terkait dengan kualitas dan keamanan jenis pangan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi.

Ukuran kualitas pangan seperti ini sulit dilakukan karena melibatkan berbagai jenis makanan dengan kandungan gizi yang berbeda-beda, sehingga ukuran keamanan hanya dilihat dari ada atau tidaknya bahan makanan yang mengandung protein hewani dan/atau nabati yang dikonsumsi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, ukuran kualitas pangan dilihat dari data pengeluaran untuk konsumsi makanan (lauk pauk) sehari-hari yang mengandung protein hewani dan nabati. Pemanfaatan Pangan erat kaitannya dengan mutu dan keamanan pangan. Mutu dan keamanan pangan tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan manusia, tetapi juga terhadap produktivitas ekonomi dan perkembangan sosial baik individu, masyarakat maupun negara. Selain itu mutu dan keamanan pangan terkait erat juga dengan kualitas pangan yang dikonsumsi, yang secara langsung berpengaruh terhadap kualitas kesehatan serta pertumbuhan fisik dan inteligensi manusia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pangan antara lain fasilitas dan layanan kesehatan dengan cara peningkatan fasilitas kesehatan yang memadai dan mempermudah layanan kesehatan, sanitasi dan ketersediaan air dengan kecukupan air bersih hal ini dikarenakan air yang kurang bersih rentan penyakit. Faktor lain yang berpengaruh terhadap penyerapan pangan yaitu pengetahuan ibu rumah tangga yang mana polamakan dan pola asuh kesehatan berdampak pada seberapa besar jumlah asupan gizi yang dikonsumsi. Apabila faktor-faktor tersebut terpenuhi tidaklah mustahil bahwasanya hasil yang diharapkan seperti peluang harapan hidup dari terpenuhinya gizi balita akan meminimalkan angka kematian bayi sebagai penerus generasi. Dari beberapa hasil observasi penyerapan pangan, bentuk dari ketahanan pangan menitik beratkan pada pola konsumsi yang diharapkan mampu memenuhi gizi maupun energi, diversifikasi pangan dan adanya jaminan keamanan pangan.

Untuk melihat aspek pemanfaatan pangan kita menggunakan data Status gizi buruk dan Kasus Gizi Buruk. Dari data yang diolah di dapatkan daerah yang rawan selama satu tahun yaitu sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	BULAN											GAB	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOV		
1	PAYAKUMBUH	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	MERAH	MERAH	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU
2	AKABILURU	KUNING	HIJAU	KUNING	HIJAU	HIJAU	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH
3	LUAK	KUNING	HIJAU	KUNING	KUNING	KUNING	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH
4	LAREH SAGO HALABAN	KUNING	KUNING	KUNING	KUNING	KUNING	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH
5	SITUJUAH LIMO NAGARI	HIJAU	HIJAU	HIJAU	KUNING	HIJAU	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU
6	HARAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	MERAH	MERAH	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU
7	GUGUAK	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU
8	MUNGKA	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	MERAH	MERAH	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU
9	SULIKI	KUNING	KUNING	KUNING	HIJAU	HIJAU	MERAH	MERAH	HIJAU	HIJAU	MERAH	HIJAU	HIJAU	HIJAU
10	BUKIK BARISAN	KUNING	KUNING	KUNING	KUNING	KUNING	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH
11	GUNUANG OMEH	HIJAU	KUNING	KUNING	KUNING	KUNING	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH
12	KAPUR IX	KUNING	KUNING	KUNING	KUNING	KUNING	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH
13	PANGKALAN	KUNING	KUNING	KUNING	KUNING	KUNING	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH

- 7-12 BULAN HIJAU
Aman = Payakumbuh, Situjuah Limo Nagari, Harau, Guguak, Mungka, Suliki,
- 4-6 BULAN HIJAU
≥ 6 BULAN KUNING
Waspada = -
- ≤ 3 BULAN HIJAU
≥ 7-12 BULAN MERAH
Rawan = Akabiluru, Luak, Lareh Sago Halaban, Bukik Barisan, Gunuang Omeh, Kapur IX, Pangkalan

Dari peta diatas dapat kita hitung persentase daerah rawan pangan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kec. Dengan Pemanfaatan Pangan yang rawan Pangan}}{\text{Jumlah Kecamatan yang Ada}} \times 100\% = \frac{7}{13} \times 100\% = 53,84\%$$

2. Investigasi

Investigasi dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil analisis SKPG yang direkomendasikan Pokja Pangan dan Gizi kepada Ketua DKP melalui Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan di provinsi dan kabupaten/kota maupun laporan yang diterima mengenai kondisi rawan pangan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Investigasi dilakukan untuk mengetahui: (1) akibat kejadian bencana pada

ketahanan pangan dan gizi suatu wilayah yang masyarakatnya tidak mampu mengatasinya tanpa bantuan dari pihak lain; (2) tipe bantuan/intervensi yang diperlukan; (3) sasaran penerima manfaat; (4) besaran bantuan; (5) waktu pelaksanaan intervensi; (6) letak lokasi sasaran; (7) mekanisme intervensi; dan (8) upaya penanganan melalui bantuan pemerintah, badan usaha, swasta nasional, atau internasional

3. Intervensi

Hasil investigasi dijadikan sebagai bahan rekomendasi untuk menetapkan jenis intervensi yang akan diambil untuk menanggulangi kerawanan pangan, sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebelum intervensi dilakukan, terlebih dahulu perlu ditetapkan sasaran penerima manfaat (kelompok atau rumah tangga), tipe bantuan/intervensi yang diperlukan, besaran bantuan, waktu intervensi, mekanisme, durasi, dan skala intervensi.

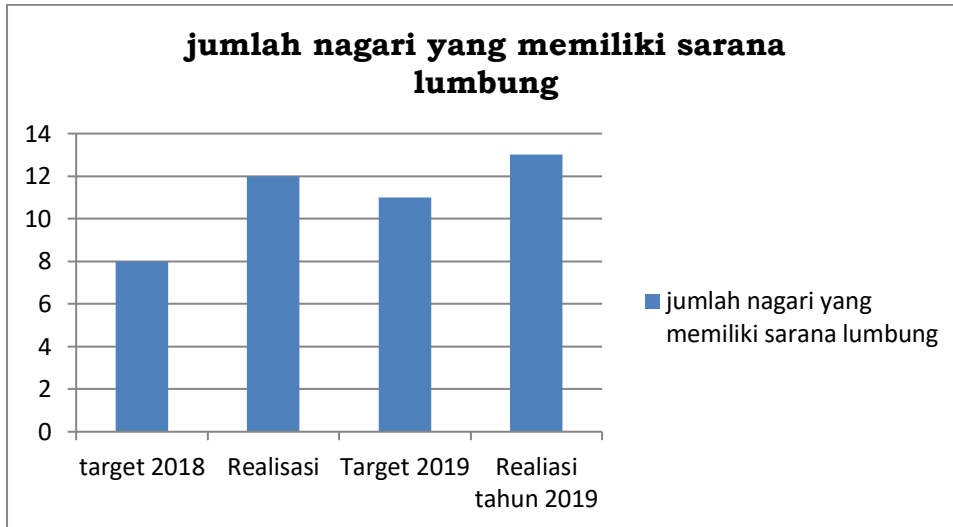
Intervensi yang dilakukan berdasarkan hasil penghitungan daerah rawan pangan berdasarkan tiga aspek yaitu aspek Ketersediaan Pangan, Akses Pangan dan pemanfaatan Pangan. Dari tiga aspek tersebut didapat daerah rawan pangan pada aspek Pemanfaatan Pangan oleh sebab itu intervensi tersebut di nilai dari status gizi balita. Timbulnya kasus kurang gizi terutama pada balita sebagai kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kerawanan pangan. Kekurangan gizi pada balita dimasa sekarang jelas akan berakibat buruk terhadap generasi bangsa dimasa yang akan datang serta menunjukkan adanya kerawanan pangan di masyarakat. Untuk mengatasi dan menanggulangi masalah kekurangan gizi pada balita perlu diberikan tambahan bahan pangan agar tidak berlanjut pada kondisi yang lebih buruk, untuk itu perlu ditetapkan lokasi dan sasaran penerima manfaat dalam penanganan daerah rawan pangan (PDRP) sebagai berikut :

NO	NAMA	L / P	UMUR (Bln)	NAMA ORTU	PUSKESMAS	NAGARI	KECAMATAN
1	M. Aqif	L	15	Noveliawati	Tanjung Pati	Sarilamak	Harau
2	Yafiq Anadim R	L	6	Yeni Yulia	Tanjung Pati	Sarilamak	Harau
3	Abdullah	L	23	Maria Susanti	Taram	Tiga Alur, Taram	Harau
4	Hafizah	P	46	Y a n i	Taram	Taga Alur	Harau
5	Hanifah	P	27	Eka Ardila	Taram	Tanjug Kubang	Harau
6	Thomas	L	20	Vaia	Taram	Padag Ambacang	Harau
7	Rahmadi Putra	L	36	Roby	Piladang	Durian Gadang	Akabiluru
8	Ariansyah	L	29	Wahyuni	Batu Hampar	Simpang Ganti	Akabiluru
9	Keyla Aprilia	P	37	Wiwit Suryani	Batu Hampar	Niur Kapalo Koto	Akabiluru
10	Nadia Kurnia Latifa	P	17	Misra	Batu Hampar	Mansiri	Akabiluru
11	Firli	L	10	Ari	Maek	Nenan	Bukik Barisan
12	Habib	L	53	Kasman	Maek	Nenan	Bukik Barisan
13	Alqif	L	19	Febri	Maek	Koto Tinggi 3	BukikBarisan
14	Tifani	P	31	Ujang	Maek	Koto Tinggi 3	Bukit Barisan
15	Maulud Safqun	L	29	Beni Yasman	Maek	Sopan gadang	Bukit Barisan
16	Rafa	L	54	Bambang	Maek	Sopan Tanah	Bukit Barisan
17	M. Arfan	L	34	Leli Gusmita	Baruah Gunuang	Baruah Gunuang I	Bukit Barisan
18	Faiza Alya	P	51	Peridawati	Banja Loweh	Jambak, Banja Loweh	Bukit Barisan
19	Ahmad Latif	L	45	Zaharatul Hayati	Banja Loweh	BL. Godang,	Bukit Barisan
20	Ahmad Rayhan Putra	L	30	Maria Sari	Banja Loweh	Tobek	Bukit Barisan
21	Faza Akbar	L	20	Wisma Yona	Banja Loweh	Balai Godang	Bukit Barisan
22	M. Alim	L	20	Cahyati	Banja Loweh	Koto Tengah	Bukit Barisan
23	Zahwa Talita	P	41	Anto	Pangkalan	Koto Ranah	Pangkalan
24	Gilbi	L	42	Wulan	Pangkalan	Seb. Pasar, Manggilang	Pangkalan
25	M. Akbar Ilahi	L	51	WirnaDesiska	Pangkalan	Koto Ranah	Pangkalan
26	Giza	L	38	Nurafriza	Rimbo Data	Panang TB	Pangkalan
27	Keyla	p	51	Nurilas	Rimbo Data	Koto Lamo Tj,Pauh	Pangkalan
28	Yayang Regina	P	37	Arwingga	Rimbo Data	Panang TB	Pangkalan

29	Hanif	L	55	Sawilis	Koto Tinggi	P. Tangan	Gunuang Omeh
30	Muharatul Alwi	L	55	Dian Afriyenti	Koto Tinggi	Talang Anau	Gunuang Omeh
31	Anidia	P	47	Nurul/Ijus	Koto Tinggi	Sei Sirih	Gunuang Omeh
32	Salsabilla azzahra	P	26	Yossi Susanti	Suliki	Batang Linjuang	Suliki
33	Latif Zaki	L	26	Vina	Suliki	L.Baruah	Suliki
34	Wendi Rahmanda	L	33	Nori Handayani	Koto Baru Simalanggang	Gando, Piobang	Payakumbuh
35	Laura	P	41	Tina	Koto Baru Simalanggang	Tabing Ranah,	Payakumbuh
36	Hanum Humaira	P	42	Erisanti	Koto Baru Simalanggang	Ampang	Payakumbuh
37	Zain Tri Hidayat	L	30	Reli Hidayanti	Dangung-Dangung	Guguk Nunang	Guguak
38	Bening	P	24	Amelia	Dangung-Dangung	Kuranji	Guguak
39	Rahmania	P	25	Santi	Dangung-Dangung	Guguk Nunang	Guguak
40	Nofrianto	L	16	Yodrianto	Situjuah	Sikabu	Situjuah Limo Nagari
41	M A Rahman	L	39	Indrawati	Mungka	Lubuak Simato, Sungai Antuan	Mungka
42	Dara Fatiya	P	38	Fitriani	Halaban	Padang Mangunai	Lareh Sago Halaban
43	Febrian	L	39	Meri	Halaban	Pauh Tinggi	Lareh Sago Halaban
44	M. Ghiano Ahadi	L	28	Mainis	Halaban	Padang Aur	Lareh Sago Halaban
45	Abdul Gani	L	4	Nelvi Gusni	Halaban	Padang Tengah	Lareh Sago Halaban
46	Dion	L	39	Gita	Mungo	Tj Haro Utara	Luak
47	Febri	L	39	Marlen	Mungo	Sikabu-kabu	Luak
48	Zidan	L	41	Mamat	Maek	Ampang gadang II	Bukik Barisan
49	Aurel	P	40	Safridon	Maek	Ampang Gadang II	Bukik Barisan
50	Ramzi	L	54	Welmi	Mungo	Sikabu-kabu	Luak

Tabel 15. lokasi dan sasaran penerima manfaat dalam penanganan daerah rawan pangan (PDRP)

d. Indikator Kinerja 4 : Jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan



Grafik 7. Jumlah Nagari yang memiliki sarana Lumbung

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan jumlah lumbung yang ada di Nagari dari tahun 2018 dengan jumlah 12 Nagari bertambah menjadi 13 Nagari pada tahun 2019, dimana artinya ada penambahan satu buah lumbung pada tahun 2019.

Lumbung pangan masyarakat dimaksudkan untuk mendekatkan akses pangan anggotanya. Lumbung dipandang sebagai model perangkat ketahanan pangan masyarakat desa yang cukup efektif. Akan tetapi seiring dengan masuknya model-model kelembagaan lain sistem lumbung sebagai pusat cadangan pangan, terutama di kawasan pedesaan, kini semakin sulit ditemukan. Sisa kearifan pengelolaan pangan itu terkikis oleh perubahan tuntutan hidup, dimana kepraktisan menjadi salah satu dasar perhitungan. Pemerintah baik pusat maupun daerah kembali mengaktifkan lumbung pangan di masyarakat dengan upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lumbung pangan, optimalisasi sumberdaya yang tersedia dan penguatan kapasitas kelembagaannya. Dengan pemberdayaan tersebut diharapkan dapat dikembangkan lumbung pangan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan serta dapat berperan secara optimal dalam penyediaan pangan.

Lumbung Pangan adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan padi atau bahan pangan lain untuk menghadapi masa paceklik. Kelompok Lumbung Pangan adalah kelembagaan cadangan pangan yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota dan dikelola secara berkelompok yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat di suatu wilayah.

Lumbung pangan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Kelompok Lumbung Pangan Harapan Bersama , Jorong Parak Lubang nagari Tanjuang Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban
2. Kelompok Lumbung Pangan Rangkiang Simpati Jorong Simpang Tigo Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru
3. Kelompok Lumbung Pangan Makmur, Jorong Koto Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh
4. Kelompok Lumbung Pangan Asoka, Jorong Aia Putih Nagari Sarilamak Kecamatan Harau
5. Kelompok Lumbung Pangan Bundo Kanduang nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX
6. Kelompok Lumbung Pangan Karambia Sabatang, Jorong Kampuang Gadang Nagari Pandam gadang Kecamatan Gunuang Omeh
7. Kelompok Lumbung Pangan Serba Usaha, Jorong Kampuang Tengah Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka
8. Kelompok Lumbung Pangan Amanah jorong padang bungo nagari Andiang Kecamatan Suliki
9. Kelompok Lumbung Pangan Baruah Tunggang Jorong Baruah Tunggang Nagari Kubang Kecamatan Guguak
10. Kelompok Lumbung Pangan Maju Bersama Jorong Jambak Nagari Banja Laweh Kecamatan Bukik Barisan
11. Kelompok Lumbung Pangan Suka Mandiri Jorong Banja Ranah Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru
12. Kelompok Lumbung Pangan Saiyo Sakato Jorong Padang Balimbiang Nagari Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban

13. Kelompok Lumbung Pangan Sawah Bakir Jorong Tanjuang Ateh Nagari Taram Kecamatan Harau

Pada tahun sebelumnya Nagari yang sudah memiliki lumbung pangan di Kabupten Lima Puluh Kota berjumlah 12 Nagari, namun pada tahun 2019 ada penambahan 1 nagari yaitu Lumbung Pangan Sawah Bakir Jorong Tanjuang Ateh Nagari Taram Kecamatan Harau.

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) tahap pengembangan dan tahap mandiri, dimana lumbung pangan masyarakat tahap pengembangan terdiri dari LPM Karambia Sabatang, LPM Serba Usaha Makmur, LPM Suka Mandiri, LPM Baruah Tunggang dan LPM Saiyo Sakato. Sedangkan yang termasuk kelompok lumbung pangan masyarakat tahap mandiri adalah LPM Rangkiang Simpati, LPM Makmur, LPM Asoka, LPM Bundo Kandung, LPM Amanah dan LPM Maju Bersama. LPM tahap pengembangan ditujukan hanya untuk iron stok sebesar 4 ton gabah, LPM tahap pengembangan merupakan LPM yang aktif namun kekurangan modal, untuk dapat menjadi LPM tahap mandiri sehingga dengan penambahan modal diharapkan dapat menjadi LPM tahap mandiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka pengembangan lumbung pangan masyarakat perlu di upayakan untuk dapat berperan dalam pengembangan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat. Berdasarkan indikator kinerja utama, jumlah nagari yang memiliki sarana lumbung pangan pada tahun 2019 dengan target 11 nagari, namun lumbung pangan yang ada pada tahun 2019 ini berjumlah 13 nagari.

Tujuan Pencapaian sasaran strategis ” Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat” dengan Indikator Kinerja Utama jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan adalah 13 Nagari. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan **Sangat Tinggi**. Hal ini dilihat dari target jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan pada tahun 2019 adalah 11 Nagari, namun pencapaiannya adalah 13 Nagari. Untuk tahun 2021 ditargetkan 16 Nagari.

Dokumentasi Lumbung Pangan Masyarakat



Gambar. 1 Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Sawah Bakir dan kelengkapannya



Gambar 2. LPM Serba Usaha Makmur



Gambar 3. LPM Saiyo Sakato

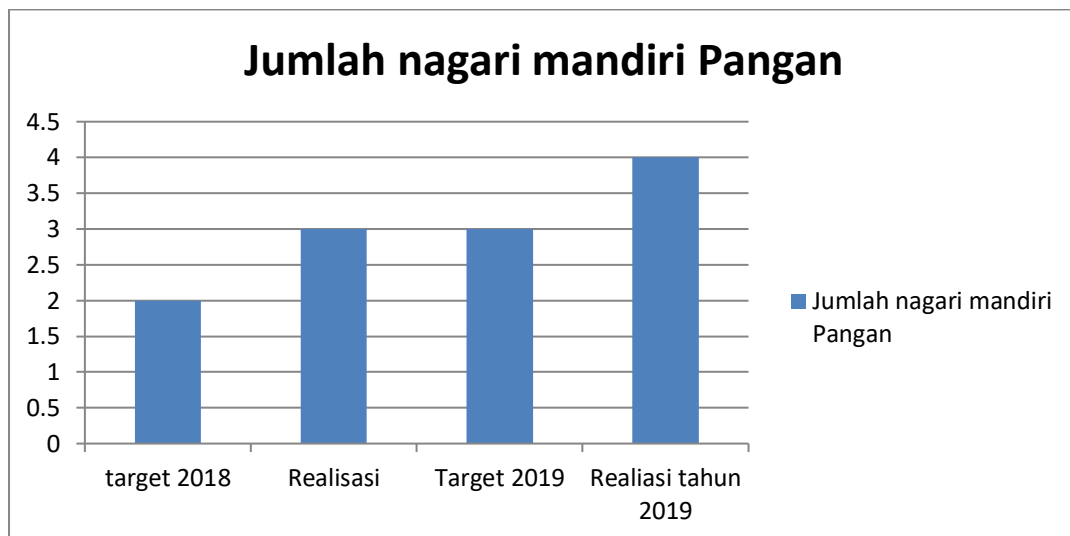


Gambar 4. LPM Baruah Tunggang



gambar 5. LPM Serba Usaha Makmur

e. Indikator Kinerja 5 : Jumlah Nagari Mandiri Pangan



Grafik 8. Jumlah Nagari Mandiri Pangan

Dilihat pada grafik diatas dari target jumlah Nagari Mandiri Pangan yang baru pada tahun 2019 adalah 3 Nagari, namun pencapaiannya adalah 4 Nagari, dimana ada satu penambahan nagari Mandiri pangan pada tahun 2019 ini. Untuk tahun 2021 ditargetkan 5 Nagari Mandiri Pangan dengan penumbuhan 1 Nagari Pertahun. Penyebab keberhasilan ini adalah tersedianya dana APBD untuk penumbuhan Nagari Mandiri Pangan.

Nagari/Desa Mandiri Pangan adalah Nagari/Desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, Sub sistem distribusi dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Nagari Mandiri Pangan merupakan salah satu strategi untuk mempercepat pembangunan didaerah pedesaan, khususnya dalam memantapkan ketahanan pangan.

Kegiatan Nagari Mandiri Pangan dilaksanakan Di Nagari/Desa yang terpilih yang mempunyai rumah tangga miskin dan berisiko rawan pangan dan gizi, dengan dasar pemilihannya adalah FIA 2005/FSVA 2009 dan Desa Rawan Pangan dengan jumlah RTM(Rumah Tangga Miskin) lebih dari 30% dari jumlah KK berdasarkan hasil survey Data Dasar Rumah Tangga (DDRT).

Komponen kegiatan yang dilakukan, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, pengembangan sistem ketahanan pangan dan dukungan sarana prasarana desa melalui koordinasi lintas sektor dalam wadah dewan ketahanan pangan.

Tahun 2019 ini sudah ada 20 kelompok DMP yang terdiri dari 11 kelompok inti DMP, 6 kelompok replikasi DMP, dan 3 kelompok Nagari Mandiri Pangan (MANTAP). Keseluruhan kelompok DMP ini tersebar di 15 Nagari dan 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota Perhitungan realisasi indikator kinerja ini sebagai berikut :

Nagari Mandiri Pangan di Kabupaten Lima tahun 2019

No	Nama Kelompok	Nagari	Kecamatan	Nagari Mandiri Pangan	Sumber Dana Tahun
1	Tegar Jaya	Tanjung gadang	Lareh Sago Halaban	Inti	APBN 2006
2	Kayuta Saiyo	Labuah Gunuang	Lareh sago Halaban	Inti	APBN 2009
3	Simpati jaya	Sariak Laweh	Akabiluru	Inti	APBN 2006
4	Bina Usaha	Koto tengah Batu Hampa	Akabiluru	Inti	APBN 2009
5	Sejahtera	Taeh Baruah	Payakumbuh	Inti	APBN 2007
6	Boncah Suka Maju	Batu Balang	Harau	Inti	APBN 2009
7	Sarilamak Sejahtera	Sarilamak	Harau	Inti	APBN 2007
8	Mandiri Jaya	Pilubang	Harau	Inti	APBN 2009
9	Sakato Indah	Sei.Naniang	Bukik Barisan	Inti	APBN 2010
10	Pangkalan Maju	Pangkalan	Pangkalan	Inti	APBN 2012
11	Elok Basamo	Durian Tinggi	Kapur IX	Inti	APBN 2012
12	Saiyo Sakato	Bukik Sikumpa	Lareh Sago halaban	Inti	APBD 2018
13	Ngarai Indah	Tanjung Bungo	Suliki	Inti	APBD 2018

14	Abadi	Kurai	Tanjung Anau	Inti	APBD 2018
15	Sarasah Murai	Harau	Harau	Inti	APBD 2019
16	Bulakan Sakato	Tanjuang Gadang	Lareh Sago halaban	Replikasi	APBN 2010
17	Tunas Bakti	Tanjuang Gadang	Lareh Sago halaban	Replikasi	APBN 2010
18	Kampai Saiyo	Sitanang	Lareh Sago halaban	Replikasi	APBN 2010
19	Lumbung Saiyo	Labuah Gunuang	Lareh Sago halaban	Replikasi	APBN 2010
20	Sago Sakato	Labuah Gunuang	Lareh Sago halaban	Replikasi	APBN 2010
21	Sayang Ibu	Sitanang	Lareh Sago halaban	Replikasi	APBN 2010

Tabel 16. Nagari Mandiri Pangan di Kabupaten Lima tahun 2019

Tujuan Pencapaian sasaran strategis ” Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat” dengan Indikator Kinerja Utama jumlah Nagari Mandiri Pangan adalah 4 Nagari. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan **Sangat Tinggi**. Hal ini dilihat dari target jumlah Nagari Mandiri Pangan yang baru pada tahun 2019 adalah 3 Nagari, namun pencapaiannya adalah 4 Nagari.

Harga dan pasokan pangan merupakan indikator strategis yang saling terkait dan sering digunakan untuk mengetahui a) status distribusi pangan, b) permasalahan yang disebabkan oleh rantai distribusi pangan, c) ketidakcukupan pasokan pangan di suatu wilayah. Permasalahan utama yang terjadi selama ini adalah tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen yang mengakibatkan keuntungan tidak proporsional antara pelaku usaha. Harga yang tinggi di tingkat konsumen tidak menjamin petani (produsen) mendapatkan harga yang layak, sehingga diperlukan keseimbangan harga yang saling menguntungkan, baik ditingkat produsen maupun konsumen.

Sebagai solusi dalam mengatasi disparitas harga pangan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Pangan melakukan terobosan dengan kegiatan “Warung Pangan Mandiri” (Paman). Kegiatan ini dilakukan

sebagai upaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis dan efisiensi rantai distribusi pemasaran dengan memperpendek rantai pasok. Selain itu, Warung PAMAN diharapkan dapat memenuhi penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) bagi masyarakat sesuai dengan amanat Perda Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 1 tahun 2017 tentang Kemandiraian dan Ketahanan Pangan. Kegiatan Warung PAMAN secara tidak langsung berperan dalam mengatasi anjloknya harga pada masa panen raya dan tingginya harga pada saat paceklik.

Warung PAMAN dimungkinkan menjadi tempat/wadah promosi/penjualan bagi Kelompok tani/Gapoktan/kelompok KRPL binaan maupun produsen pangan lainnya yang mempunyai komitmen bagi stabilisasi harga dan pasokan untuk memasarkan komoditas pangan hasil produksi pertanian/peternakan khususnya beras, cabe merah keriting, bawang merah dan telur yang diproduksi langsung dari pertanian serta komoditas pangan lainnya. Keberadaan Warung PAMAN diharapkan mampu memangkas mata rantai distribusi komoditas pangan yang dipasarkan langsung melalui Warung PAMAN sehingga harga dapat selalu dikendalikan lebih rendah dari harga pasar. Oleh sebab itu pada setiap Desa/nagari Mandiri Pangan tahap penumbuhan di sediakan satu unit Warung Pangan Mandiri (warung PAMAN).

Dokumentasi Desa Mandiri Pangan / Warung Pangan Mandiri



Gambar 6. Warung PAMAN Kelompok Saiyo Sakato



gambar 7. Pertemuan Evaluasi DMP Harau



Gambar 8. Pertemuan Evaluasi DMP Labuah Gunung



gambar 9. Pertemuan Evaluasi DMP Sei Naniang



Gambar 10. Pertemuan Evaluasi DMP Nagari Sariak Laweh



gambar 11. Pertemuan Evaluasi DMP Nagari Pangkalan

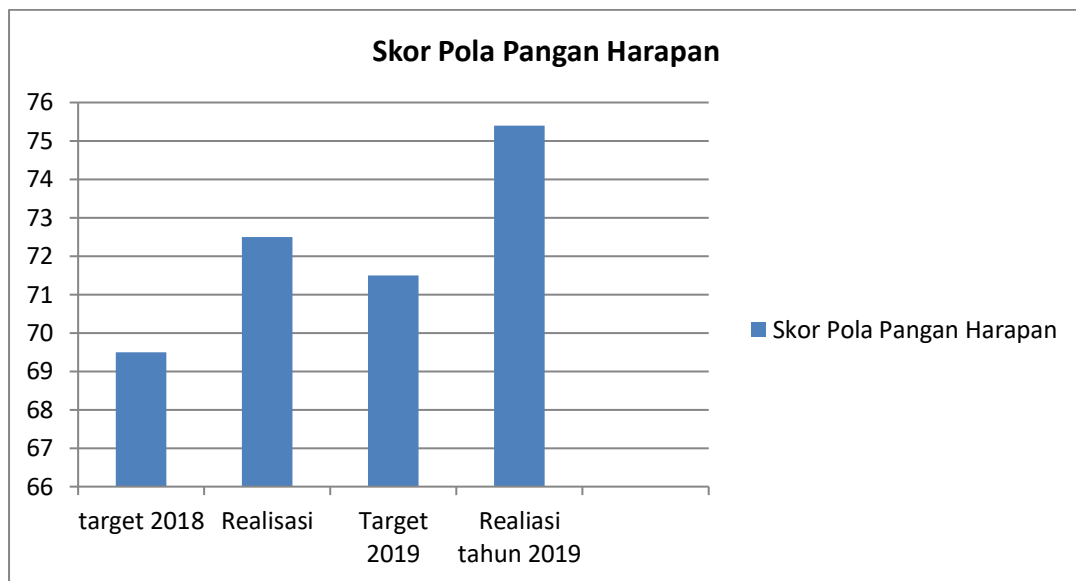
1 Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Ke t
1.	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi		69,5	72,5	71,5	75,4	
2	2. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan		80%	100% 93%	85%	100% 88%	

Tabel 17. Sasaran strategis 2

a. Indikator Kinerja 1: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi



Grafik 9. Skor Pola Pangan Harapan

Dari grafik 9 dapat kita lihat peningkatan jumlah PPH dari tahun 2018 yaitu dari 72,5 pada tahun 2018 meningkat menjadi 75,4. Dimana artinya semakin beragam konsumsi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun sebelumnya.

Konsumsi pangan merupakan banyaknya atau jumlah pangan, secara tunggal maupun beragam, yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis dan sosiologis. Tujuan fisiologis adalah upaya untuk memenuhi keinginan makan (rasa lapar) atau untuk memperoleh zat-zat gizi yang diperlukan tubuh. Tujuan psikologis adalah untuk memenuhi kepuasan emosional atau selera, sedangkan tujuan sosiologis adalah untuk memelihara hubungan manusia dalam keluarga dan masyarakat. Konsumsi pangan merupakan faktor utama untuk memenuhi kebutuhan gizi yang selanjutnya bertindak menyediakan energi bagi tubuh, mengatur proses metabolisme, memperbaiki jaringan tubuh serta untuk pertumbuhan.

Konsumsi, jumlah dan jenis pangan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi konsumsi pangan adalah jenis, jumlah produksi dan ketersediaan pangan. Untuk tingkat konsumsi, lebih banyak ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi. Kualitas pangan mencerminkan adanya zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh yang terdapat dalam bahan pangan, sedangkan kuantitas pangan mencerminkan jumlah setiap gizi dalam suatu bahan pangan. Untuk mencapai keadaan gizi yang baik, maka unsur kualitas dan kuantitas harus dapat terpenuhi.

pemanfaatan atau konsumsi pangan merupakan salah satu *entry point* dan *sub system* untuk memantapkan ketahanan pangan. Dengan mengetahui pola konsumsi pangan masyarakat akan dapat disusun kebijakan terkait dengan penyediaan pangan, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor. Kebijakan produksi pangan mencakup berapa volume dan jenis pangan yang mampu diproduksi dengan memperhatikan sumberdaya lahan, air, teknologi dan sarana pendukung lainnya. Dengan memperhatikan potensi produksi dan permintaan pangan akan dapat ditetapkan berapa banyak dan jenis pangan yang harus diproduksi di dalam negeri atau diimpor. Selain itu dengan mengetahui perubahan konsumsi pangan masyarakat, juga dapat disusun kebijakan harga dan distribusi pangan agar masyarakat dapat menjangkau pangan yang tersedia. Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang utama dan merupakan sumber beragam zat gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk memenuhi kebutuhan fisiologi tubuh agar manusia dapat hidup sehat dan produktif. Oleh karena itu disadari bahwa gizi merupakan unsur yang sangat penting dalam membentuk kualitas manusia.

Untuk melihat pola atau tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat dapat diukur melalui suatu sistem Pola Pangan Harapan (PPH). Pola pangan harapan (PPH) adalah suatu komposisi pangan yg seimbang untuk dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan gizi

penduduk. Pola pangan harapan ini mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif, untuk menghasilkan suatu komposisi normal atau standar pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi penduduk. sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutricional balance*), cita rasa (*porlability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kualitas dan kemampuan daya beli (*affeadebility*).

Oleh karena itu untuk hidup sehat telah ditetapkan pola pangan harapan yang ideall dimana konsumsi 9 kelompok bahan pangan dengan skor Pola Pangan Harapan sebesar 100 seperti yang terlihat pada tabel berikut ;

Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Ideal

Standar PPH Ideal 2015						
Kelompok Pangan	Nasional			Regional*)		
	%AKE	Bobot	Skor	%AKE	Bobot	Skor
Padi-padian	50%	0,5	25,0	45%	0,5	22,0
Umbi-umbian	6%	0,5	2,5	12%	0,5	6,0
Pangan Hewani	12%	2,0	24,0	12%	2,0	24,0
Minyak & Lemak	10%	0,5	5,0	10%	0,5	5,0
Buah/Biji Bminyak	3%	0,5	1,0	2%	0,5	1,0
Kacang-kacangan	5%	2,0	10,0	5%	2,0	10,0
Gula	5%	0,5	2,5	5%	0,5	2,0
Sayur & Buah	6%	5,0	30,0	6%	5,0	30,0
Lain-lain	3%	0,0	0,0	3%	0,0	0,0
Total	100%		100,0	100%		100,0

Nilai capaian peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakintingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang. Penghitungan angka PPH melalui olahan beberapa tahapan. Secara garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\% \text{ AKE} = \frac{\text{Konsumsi energi aktual (kcal/kap/hari)}}{2000 \text{ kcal/kap/hr}} \times 100 \%$$

Skor AKE = Σ (% AKE x bobot perkelompok makanan)

Skor PPH (skor AKE dibandingkan dengan skor Maks, jika AKE > skor maks maka diambil maka yang dijadikan skor PPH perkomoditi adalah angka skor maks, apabila AKE < skor maks maka skor PPH yang digunakan adalah %AKE

Kualitas konsumsi pangan ditentukan oleh berbagai faktor antara lain, dari komposisi konsumsi pangan masyarakat berdasarkan kontribusi energi setiap kelompok pangan yang dikombinasikan dengan tingkat kecukupan energinya. Penilaian kualitas dan mutu konsumsi pangan seperti ini dilakukan dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencerminkan keseimbangan komposisi kelompok pangan dan zat gizi yang dikonsumsi. **Nilai/skor mutu PPH ini juga dapat memberikan informasi mengenai pencapaian kualitas ragam (diversifikasi) konsumsi pangan. Semakin besar skor PPH maka kualitas konsumsi pangan dalam artian jumlah dan komposisi dinilai semakin baik.**

Skor PPH penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

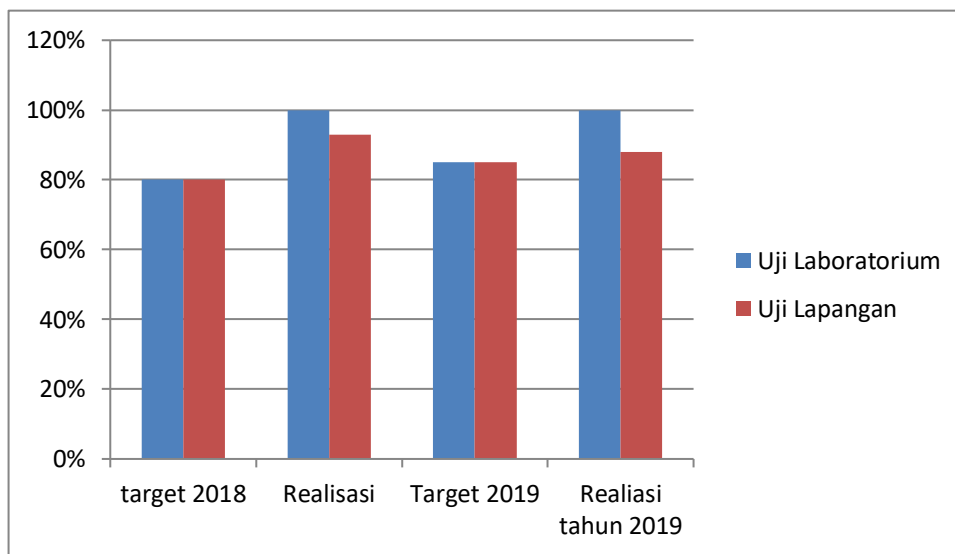
No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/ Kapita/ Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	351,0	1.456,0	62,3	67,7	0,5	31,2	33,9	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	37,6	34,0	1,5	1,6	0,5	0,7	0,8	2,5	0,8
3	Pangan Hewani	102,3	169,9	7,3	7,9	2,0	14,5	15,8	24,0	15,8
4	Minyak dan Lemak	35,2	317,6	13,6	14,8	0,5	6,8	7,4	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	21,1	112,6	4,8	5,2	0,5	2,4	2,6	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	13,9	35,2	1,5	1,6	2,0	3,0	3,3	10,0	3,3
7	Gula	22,0	80,1	3,4	3,7	0,5	1,7	1,9	2,5	1,9
8	Sayur dan Buah	216,1	97,7	4,2	4,5	5,0	20,9	22,7	30,0	22,7
9	Lain-lain	63,2	33,8	1,4	1,6	-	-	-	-	-
	Total		2.336,8	100	108,7		81,3	88,3	100,0	75,4

Tabel 18. Skor PPH penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

Dari tabel diatas angka PPH 2019 adalah sebesar 75,4 dimana PPH tahun 2019 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 71,5. Namun Skor PPH tersebut menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan masih belum begitu beragam serta belum mencerminkan keseimbangan gizi antar kelompok pangan. Hal ini terlihat dari adanya beberapa komoditi pangan yang skornya masih di bawah skor ideal dimana hal ini menggambarkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin jauh dari keragaman dan keseimbangan konsumsi yang dianjurkan sesuai dengan Pola Pangan Harapan. Oleh sebab itu pemahaman tentang pentingnya pola konsumsi pangan yang Beragam, bergizi seimbang dan aman perlu semakin ditingkatkan melalui sosialisasi, penyuluhan, pemberdayaan kelompok wanita serta peningkatan pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan guna meningkatkan ketersediaan dan akses pangan masyarakat serta menunjang percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Untuk peningkatan capaian kinerja maka Dinas Pangan

kabupaten Lima Puluh kota melaksanakan program ketahanan pangan dengan memfasilitasi kelompok wanita tani untuk pemanfaatan pekarangan dengan aneka tanaman sayuran maupun buah-buahan serta budidaya ternak yang hasilnya dapat dikonsumsi oleh keluarga sehingga status gizi dapat lebih baik.

b. Indikator Kinerja 1: Persentase pangan segar yang dinyatakan aman hasil pemeriksaan laboratorium



Grafik 10. Persentase pangan segar yang dinyatakan aman

Dilihat pada grafik diatas capaian indikator diatas target yang ditetapkan baik pada tahun 2018 maupun 2019. Namun pada tahun 2019 adanya penurunan persentase pangan yang dinyatakan aman dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh adanya pangan yang diperiksa yang mengandung zat-zat yang terdeteksi bahaya bagi kesehatan.

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lainnya yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan disebutkan bahwa pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sangat penting bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan

peningkatan derajat kesehatan serta kecerdasan masyarakat. Masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang merugikan dan / atau membahayakan kesehatan.

Saat ini permasalahan keamanan pangan yang masih menjadi perhatian utama antara lain, sering terjadinya kasus keracunan makanan, produk pangan segar kalah bersaing di pasaran akibatnya komoditi tersebut melebihi Batas Maksimum Residu (BMR), kurangnya pengawasan terhadap produk impor, penerapan sistem mutu yang belum mantap serta belum adanya pemantauan dan pengawasan secara terpadu oleh instansi terkait.

Keamanan pangan merupakan aspek yang luas, dimana harus melibatkan beberapa stakeholder terkait untuk mencapai tujuan dalam penanganannya yang mencakup produsen, konsumen dan unsur pengawas dan aparat. Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, produsen dan masyarakat. Untuk itu diperlukan konsep “terpadu” agar setiap pihak dapat berperan dalam rangka meningkatkan keamanan pangan.

Salah satu tugas dan wewenang yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam hal keamanan pangan antara lain :melakukan pengawasan pangan segar yang beredar dan pengujian berkaitan dengan mutu dan keamanan pangan, melakukan monitoring mutu dan keamanan pangan baik segar maupun olahan serta pengakuan (sertifikasi dan registrasi) kepada pelaku bisnis pangan. Dinas Pangan merupakan salah satu instansi yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menjalankan fungsi pemantauan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat.

Pangan segar yang beredar di pasar baik yang berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota maupun dari luar Daerah belum tentu terjamin dari cemaran residu bahan kimia (pestisida, formalin, dll). Guna mendeteksi dan mengendalikan jumlah / tingkat cemaran residu bahan kimia baik cemaran fisik dan biologi lainnya yang beredar di masyarakat perlu dilakukan pengawasan keamanan pangan serta dengan melakukan uji laboratorium terhadap pangan segar tersebut.

Dari indikator ini diharapkan kondisi keamanan pangan segar yang beredar di masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkat, oleh karena itu dilaksanakan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan segar. Dalam hal ini dilakukan pengawasan dan pengambilan sampel terhadap pangan segar yang beredar di masyarakat. Sampel pangan segar yang ada di tengah masyarakat (pasar tradisional) diuji di laboratorium dan juga ada yang langsung diuji dilapangan sehingga dapat diketahui cemaran yang bisa mempengaruhi bahan pangan tersebut.

Tahun 2019 penanganan keamanan pangan segar dilakukan terhadap 10 sampel pangan segar yang diambil dari pasar tradisional yang ada di Nagari Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 15 Agustus 2019 dengan jumlah sampel sebanyak 10 sampel yang terdiri dari Kacang Panjang, Bawang Merah, Cabe, Buncis, Pare, Terong, Pepaya, Pisang, Jeruk dan semangka. Hasil pengujian labor seperti dalam tabel berikut ini :

NO	NAMA SAMPEL	Jenis	HASIL (mg/kg)	Batas Penetapan(mg/kg)	BMR (mg/kg)
1.	Kacang Panjang	Klorfirofos Metomil Metidation	Tidak terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi	0,059 0,050 0,035	0,100 0,200 -
2.	Bawang Merah	Diazinon Metomil Metidation	Tidak terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi	0,020 0,050 0,035	0,050 0,200 0,100
3.	Cabe	Metomil Diazinon Klorfirifos	Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi 0,129	0,059 0,020 0,005	- - 3,000
4.	Buncis	Klorfirifos Metomil Metidation	Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi	0,059 0,050 0,035	0,100 0,050 -

5.	Pare	Klorfirifos Metomil Metidation	Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi	0,059 0,050 0,035	- - -
6.	Terong	Profenofos Diazinon Metomil	Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi	0,005 0,020 0,050	- - -
7.	Pepaya	Diazinon Klorfirifos Profenofos	Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi	0,020 0,059 0,005	- - -
8.	Pisang	Diazinon Klorfirifos metidation	Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi	0,020 0,059 0,039	- 2,000 -
9.	Jeruk	Dimethoat Klorfirifos Metidation	0,177 Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi	0,024 0,059 0,035	5,000 1,000 2,000
10.	Semangka	Diazinon Metomil Metidation	Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi	0,020 0,050 0,035	- - -

Tabel 19. Hasil pengujian Laboratorium

Dari 10 sampel yang diambil dan sudah dilakukan uji laboratorium 8 sampel dinyatakan aman dan tidak terdeteksi sedangkan dua diantaranya yaitu komoditi cabe dan jeruk terdeteksi namun masih dibawah ambang batas maksimal residu (BMR) oleh sebab itu masih dinyatakan aman untuk dikonsumsi.

Dari indikator kinerja tahun 2019 “Persentase pangan segar yang dinyatakan aman hasil pemeriksaan laboratorium” dengan target 85% dapat dihitung dengan cara :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase pangan segar yang dinyatakan aman} &= \frac{\text{jumlah sampel yang dinyatakan aman}}{\text{total jumlah sampel}} \times 100\% \\
 &= \frac{10}{10} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Dokumentasi Sampel yang diuji di Laboratorium



Gambar 12. Sampel yang diuji di laboratorium

Selain uji laboratorium juga dilakukan uji bahan pangan segar yang ada dilapangan. Tempat pengambilan sampel yaitu pada pasar tradisional yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengujian yang dilakukan yaitu uji Nima Halal, Rhodamin B, Pestisida, Metanil dan uji formalin yang dilakukan oleh Tim Keamanan Pangan . Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	JENIS SAMPEL	LOKASI PASAR	JENIS UJI	PEMILIK	HASIL (-/+)
1	Daging	Pasar Limbanang	Nima Halal	Am	-
2	Daging	Pasar Limbanang	Nima Halal	Ril	-
3	Daging	Pasar Piladang	Nima Halal	Is	-
4	Daging	Pasar Piladang	Nima Halal	Hendra	-
5	Daging	Pasar Sarilamak	Nima Halal	Epi	-
6	Daging	Pasar Sarilamak	Nima Halal	Epi	-
7	Daging	Pasar Pakan Rabaa LSH	Nima Halal	Jon	-
8	Daging	Pasar Pakan Rabaa LSH	Nima Halal	Jon	-
9	Cabe Giling	Nagari Kurai	Rhodamin B	Wit	-
10	Cabe Giling	Nagari Bukik Siumpa	Rhodamin B	Jasmi	-
11	Cabe Giling	Nagari Tanjung Bungo	Rhodamin B	Idil	-
12	Buncis	Pasar Limbanang	Pestisida	Susniawati	-
13	Cabe	Pasar Limbanang	Pestisida	Esi	-
14	Lobak	Pasar Limbanang	Pestisida	Adi	-

15	Tomat	Pasar Limbanang	Pestisida	Norma	+
16	Jeruk	Pasar Limbanang	Pestisida	MakIdar	-
17	Tomat	Pasar Piladang	Pestisida	Rina	+
18	Kembang Kol	Pasar Piladang	Pestisida	Melis	-
19	Cabe Merah	Pasar Piladang	Pestisida	Melis	+
20	Cabe Merah	Pasar Sarilamak	Pestisida	Nen	-
21	Tomat	Pasar Sarilamak	Pestisida	Nen	+
22	Lobak	Pasar Pakan Rabaa LSH	Pestisida	Sri	-
23	Tomat	Pasar Pakan Rabaa LSH	Pestisida	Sri	+
24	Kunyit Giling	Pasar Limbanang	Metahil Yellow	Effendi	-
25	Tahu Kuning	Pasar Limbanang	Metahil Yellow	Iqbal	-
26	Kunyit Giling	PasarPiladang	Metahil Yellow	Aan	-
27	Kunyit Giling	Pasar Sarilamak	Metahil Yellow	Susi	-
28	Tahu Kuning	Pasar Sarilamak	Metahil Yellow	Efiendi	-
29	Kunyit Giling	Pasar Pakan Rabaa LSH	Metahil Yellow	Indra	-
30	Kunyit Giling	Nagari Kurai	Metahil Yellow	Wit	-
31	Kunyit Giling	Nagari Bukik Siumpa	Metahil Yellow	Jasmi	-
32	Kunyit Giling	Nagari Tanjung Bungo	Metahil Yellow	Idil	-
33	Ikan Jambal	Pasar Limbanang	Formalin	Kenen	-
34	Ikan Sapek Siam	Pasar Limbanang	Formalin	Kenen	-
35	Ikan Asin	Pasar Limbanang	Formalin	Kenen	-
36	Ikan Gabus	Pasar Piladang	Formalin	Rian	-
37	Ikan Pandan-pandan	Pasar Piladang	Formalin	Rian	-
38	Jangek	Pasar Piladang	Formalin	Iqbal	-
39	Udang	Pasar Sarilamak	Formalin	Jon	-
40	Ikan tamban	Pasar Sarilamak	Formalin	Anggun	-
41	IkanTerubuk	Pasar Pakan Rabaa LSH	Formalin	Ujang	-
42	Ikan Jarangan	Pasar Pakan Rabaa LSH	Formalin	Ujang	-

Tabel 20. Hasil pemeriksaan Uji Lapangan

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah sampel yang diuji sebanyak 42 dengan berbeda metode pengujian didapatkan hanya 5 (lima) komoditi yang positif menggunakan pestisida.

Dari indikator kinerja tahun 2019 “Persentase pangan segar yang dinyatakan aman hasil pemeriksaan uji lapangan” dengan target 85% dapat dihitung dengan cara :

$$\begin{aligned} \text{Persentase pangan segar yang dinyatakan aman} &= \frac{\text{jumlah sampel yang dinyatakan aman}}{\text{total jumlah sampel}} \times 100\% \\ &= \frac{37}{42} \times 100\% \\ &= 88\% \end{aligned}$$

Tujuan Pencapaian sasaran strategis ” Meningkatkan Konsumsi Pangan masyarakat yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman” dengan Indikator Kinerja Utama jumlah Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan dengan target 85% dalam pengujian laboratorium dinyatakan pencapaian keberhasilan 100%. Sedangkan untuk uji lapangan pencapaian keberhasilan sebesar 88%. Dimana dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator diatas target yang ditetapkan untuk tahun 2019.

Dokumentasi Pengambilan sampel Lapangan



gambar 13. Tim Keamanan Pangan segar Kabupaten Lima Puluh Kota



Gambar 14. Mengambil sampel di tradisional piladang



gambar 15. Pengujian sampel pasar tradisional piladang



Gambar 16. Mengambil sampel di pasar tradisional Suliki



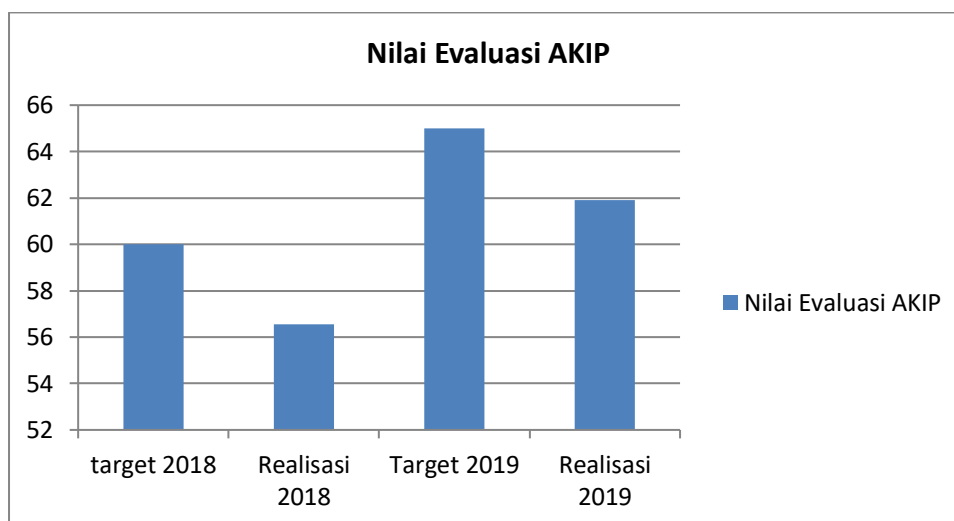
gambar 17. Pengujian sampel pasar tradisional Suliki

3. Strategis 3

Sasaran Strategis 3

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Ket
1	Nilai Evaluasi AKIP		60	56,54	65	61,91	

Tabel 21. Sasaran Strategis 3



Grafik 11. Nilai Evaluasi AKIP

Dari grafik diatas dapat dilihat adanya peningkatan Nilai dari tahun 2018, namun seiring dengan itu juga ada peningkatan target yang ditetapkan dari tahun sebelumnya sehingga pencapaian masih dibawah 100%.

Evaluasi AKIP merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi AKIP diperlukan bagi setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perencanaan organisasinya. Oleh sebab itu diharuskan untuk setiap instansi menyusun Laporan Kinerja yang merupakan penjabaran akuntabilitas atas perencanaan strategis instansi yang meliputi Pernyataan Penetapan Perjanjian Kinerja, RKT dan Renstra.

Pengategorian peringkat ini dapat diartikan interpretasi dan karakteristik instansinya sebagai berikut :

NO	SKOR	NILAI	INTERPRESTASI DAN KARAKTERISTIK INSTANSI
1.	> 85	AA	Memuaskan: Memimpin perubahan, 100 berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan akuntabel, perlu terus berinovasi
2.	> 75-85	A	Sangat Baik: Akuntabilitas kinerjanya baik, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, menggunakan knowledge management untuk membangun budaya berkinerja, perlu banyak inovasi
3	> 65-75	B	Baik: akuntabilitas kinerjanya baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perbaikan untuk systems dan perlu banyak berfokus perbaikan soft systems
4.	> 50-65	CC	Cukup Baik (memadai): Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja bagi pertanggungjawaban, tapi perlu banyak perbaikan, termasuk sedikit perbaikan yang mendasar
5.	>30-50	C	Agak Kurang: Memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi kurang dapat diandalkan, perlu banyak perbaikan dan termasuk perbaikan yang mendasar
6	0-30	D	Kurang: sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Tabel 22. Pengategorian peringkat ini dapat diartikan interpretasi dan karakteristik instansinya

Pada tahun 2019 yang menyusun Laporan tahun 2018 Dinas Pangan memiliki rincian Nilai Sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	20,29
2	Pengukuran Kinerja	13,13
3	Pelaporan Kinerja	10,42
4	Evaluasi Internal	5,83
5.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	12,25
	Total	61,91 (CC)

Tabel 22. Rincian Nilai Laporan tahun 2018

Nilai CC dapat diartikan Cukup Baik (memadai): Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja bagi pertanggungjawaban, tapi perlu banyak perbaikan, termasuk sedikit perbaikan yang mendasar. Oleh sebab itu dapat diartikan Dinas Pangan masih harus banyak memperbaiki kinerja maupun perencanaannya.

1. Hasil Rekomendasi APIP atas Review LKJIP tahun 2018

Terdapat hasil evaluasi atas sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah direkomendasikan sebagai berikut :

a) Perencanaan Kinerja

- Menyajikan Indikator Keberhasilan tujuan dalam mencapai tujuan/sasaran pada Dokumen Renstra
- Mempublikasikan Dokumen perjanjian Kinerja yang telah disusun
- Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) seluruhnya agar memenuhi kriteria indikator kinerja yang smart
- Melaksanakan penyusunan SOP tentang Monitoring Renstra
- Mengoptimalkan monitoring secara berkala dan memanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan pada rencana aksi.

b) Pengukuran Kinerja

- Melakukan reuiu IKU secara berkala dan di publikasikan
- Setiap kegiatan didukung dengan data-data yang dapat diandalkan dan disusun SOP Pengumpulan data Kinerja
- Pengukuran Kinerja akan menggunakan teknologi informasi
- Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran akan memanfaatkan pengukuran kinerja IKU
- Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi secara berkala (bulanan/triwulan/semester) akan dilaksanakan secara optimal

c) Pelaporan Kinerja

Menyajikan capaian kinerja organisasi dengan analisis capaian kinerja dengan sususunan sebagai berikut :

- Dalam laporan kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dan keuangan terkait pencapaian sasaran kinerja instansi sehingga informasi tersebut dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan

d) Evaluasi Internal

- Melakukan pemantauan terhadap Rencana Aksi yang dilaksanakan sehingga alternatif perbaikan dalam pengendalian kinerja dapat dilaksanakan
- Menindaklanjuti perbaikan terhadap hasil evaluasi program dimasa yang akan datang
- Menindaklanjuti hasil evaluasi Rencana Aksi dalam bentuk langkah nyata

e) Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Membuat inovasi dalam manajemen kinerja agar target kinerja dapat tercapai dengan baik.

2. REALISASI ANGGARAN

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Awal (RP)	Anggaran Perubahan (RP)	Realisasi Anggaran Perubahan (RP)	Persentase (%)
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/pertanian)	1.165.293.500	1.761.001.536	1.678.150.378	95,29
	➤ Penanganan Daerah Rawan Pangan	100.162.500	100.162.500	95.362.400	95,20
	➤ Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	307.600.000	321.610.000	300.149.600	93,32
	➤ Pemantauan dan Analisis akses pangan masyarakat	78.615.000	87.530.000	86.917.430	99,30
	➤ Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	72.450.000	72.450.000	71.699.800	98,96
	➤ Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	78.240.000	87.565.000	70.214.300	80,18
	➤ Pengembangan Lumbung Pangan Desa	133.516.000	697.666.000	690.455.388	98,96
	➤ Pengembangan Desa Mandiri Pangan	290.350.000	289.658.036	269.661.460	93,09
	➤ Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	104.360.000	104.360.000	93.690.000	89,77
2.	Peningkatan Kesejahteraan Petani	90.000.000	90.000.000	88.729.000	98,58
	➤ Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	90.000.000	90.000.000	88.729.000	98,58

Tabel 23. Realisasi Anggaran

3. ANALISIS EFISIENSI

NO	Program/ Kegiatan				Efisiensi/ tidak
		Realisasi Anggaran Perubahan (RP)	% Keuangan	% Fisik	
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/pertanian)	1.678.150.378	95,30	100	Efisiensi
	➤ Penanganan Daerah Rawan Pangan	95.362.400	95,21	100	Efisiensi
	➤ Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	300.149.600	93,33	100	Efisiensi
	➤ Pemantauan dan Analisis akses pangan masyarakat	86.917.430	99,30	100	Efisiensi
	➤ Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	71.699.800	98,96	100	Efisiensi
	➤ Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	70.214.300	80,19	100	Efisiensi
	➤ Pengembangan Lumbung Pangan Desa	690.455.388	98,97	100	Efisiensi
	➤ Pengembangan Desa Mandiri Pangan	269.661.460	93,10	100	Efisiensi
	➤ Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	93.690.000	89,78	100	Efisiensi
2.	Peningkatan Kesejahteraan Petani	88.729.000	98,59	100	Efisiensi
	➤ Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	88.729.000	98,59	100	Efisiensi

Tabel 24. Analisis Efisiensi

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, Laporan Kinerja menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, Laporan Kinerja akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Indikator Kinerja., capaian kinerja prjanjian Kinerja tahun 2019, dari 8 indikator, sebanyak 6 Indikator berhasil memperoleh nilai diatas 91% (sangat tinggi). Keenam indikator tersebut yaitu Jumlah ketersediaan Energi dan protein Kap/hari, jumlah nagari yang memeiliki sarana lumbung pangan, jumlah nagari mandiri pangan, Skor Pola Pangan harapan (PPH) Konsumsi pangan berdasarkan angka kecukupan gizi, persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan dan Nilai evaluasi AKIP. Nilai pencapaian 76-90% (tinggi) sebanyak 1 indikator yaitu Persentase Kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan. Nilai pencapaian nilai <50 (sangat rendah) sebanyak 1 indikator yaitu jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah.

Upaya perbaikan telah dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan SKPD lain dan pihak-pihak terkait, mengoptimalkan sumberdaya yang ada serta memperbaiki fungsi manajemen mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Namun demikian, beberapa tantangan dan isu-isu ketahanan pangan masih menjadi focus perbaikan kinerja Dinas pangan kedepannya. Pertama, walaupun pencapaian IKU sudah baik, namun belum semua permasalahan ketahanan pangan di masyarakat terjawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak pada aspek ketersediaan bahan pangan dimana saat ini kondisi lahan yang semakin sempit akibat pembangunan. Kondisi ini diperparah dengan sering terjadinya bencana banjir, longsor dan kekeringan diluar kontrol manusia. Peran Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota sangat diperlukan sebagai institusi yang melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar ketersediaan bahan pangan tetap stabil.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Tanjung Pati, Januari 2020

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



GUSDIAN LAORA, SKM, M.SI
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP.19650827 198803 1 004

DAFTAR PRESTASI YANG DIPEROLEH TAHUN 2019

No	Jenis Kegiatan/Lomba (beserta dokumen pendukung, sertifikat, foto, dll)	Prestasi		
		Tingkat Kabupaten	Tingkat Provinsi	Tingkat Nasional
1.	Penghargaan Adhykarya Pangan Nusantara Tahun 2019		√	
2.	Lomba Pemanfaatan Lahan Pekarangan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019		√	
3.	Lomba Cipta Menu B2SA Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2019		√	
4.	Lomba Stand Pameran Pekan Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019	√		
5.	Kegiatan Panel Harga : Petugas Enumerator Pedagang Tahun 2019			√

Tabel 25. Analisis Efisiensi

Tanjung Pati, Januari 2020

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**GUSDIAN LAORA, SKM,M.SI
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP.19650827 198803 1 004**



Gambar 18. Penghargaan Adhyakarya Pangan Nusantara Tingkat Provinsi Sumatera Barat



Gambar 19. Lomba Cipta Menu berbasis Sumber daya Lokal Tingkat Sumatera Barat Tahun 2019



Gambar 20. Pemenang Lomba Pemanfaatan Lahan Pekarangan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019



Gambar 21. Pemenang Lomba Pemanfaatan Lahan Pekarangan dan B2SA Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019